



# LAPORAN KEUANGAN

**SEMESTER 2**

**ESELON 1**

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
HUKUM DAN HAM**



**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPSDM Hukum dan HAM adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPSDM Hukum dan HAM mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna bagi para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPSDM Hukum dan HAM. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Depok, 25 Februari 2021  
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



Asep Kurnia  
NIP 196611191986031001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
Pernyataan Tanggung Jawab	III
Ringkasan	IV
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	2
III. Laporan Operasional	3
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	4
V. Catatan atas Laporan Keuangan	5
A. Penjelasan Umum	5
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	18
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	30
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	46
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	55
F. Pengungkapan Penting Lainnya	59
VI. Lampiran dan Daftar	

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Penggabungan Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Depok, 25 Februari 2021  
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned to the right of the QR code.

Asep Kurnia  
NIP 196611191986031001

Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Semester II Tahun 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja periode yang berakhir per 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester II TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.1.536.070.852,- atau mencapai 181% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.849.625.000,-.

Realisasi Belanja Negara pada Semester II TA 2020 adalah sebesar Rp.228.109.528.016,- atau mencapai 98% dari alokasi anggaran sebesar Rp.233.879.511.000,-.

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020. Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp.1.343.097.260.592,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.791.142.740,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.0,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.1.341.084.676.219,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.1.221.441.633,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.105.678.225,- dan Rp.1.342.991.582.367,-.

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan

surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.1.079.169.006,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp.137.092.194.928,- sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp.136.013.025.922,-). Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.702.594.914,- dan (Rp.135.310.431.008,-) sehingga entitas mengalami Surplus/Defisit-LO sebesar Rp.135.310.431.008,-.

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas Awal periode yang berakhir per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.1.230.994.765.415,- ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp. 135.310.431.008,-) kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai (Rp.5.278.724.897,-) dan transaksi antar entitas senilai Rp.252.585.972.857,- sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp.1.342.991.582.367,-.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester II Tahun 2020 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR**  
**31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	SMT II TA 2020		% thd Angg	SMT II TA 2019
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	849.625.000	1.536.070.852	180,79	3.436.255.357
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>849.625.000</b>	<b>1.536.070.852</b>	<b>180,79</b>	<b>3.436.255.357</b>
<b>BELANJA</b>	B.2.				
<b>Belanja Operasi</b>					
Belanja Pegawai	B.3	30.330.246.000	29.970.614.033	98,81	28.368.995.821
Belanja Barang	B.4	95.456.978.000	90.705.625.873	95,02	112.969.916.834
Belanja Modal	B.5	108.092.287.000	107.433.288.110	99,39	1.522.018.000
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>233.879.511.000</b>	<b>228.109.528.016</b>	<b>97,53</b>	<b>142.860.930.655</b>

***Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan***

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang PNB	C.4	55.000.000	55.000.000
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	(275.000)	(275.000)
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	736.417.740	948.042.361
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>791.142.740</b>	<b>1.002.767.361</b>
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Tagihan Tuntutan	C.13	-	-
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi		-	-
<b>Jumlah Piutang Jangka Panjang</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.14	1.089.000.068.000	1.072.226.368.000
Peralatan dan Mesin	C.15	77.320.563.531	52.360.266.470
Gedung dan Bangunan	C.16	239.994.199.536	149.797.879.335
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.17	9.444.644.993	9.395.644.993
Aset Tetap Lainnya	C.18	2.972.643.997	2.972.643.997
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(77.647.443.838)	(57.213.958.046)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>1.341.084.676.219</b>	<b>1.229.538.844.749</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tak Berwujud	C.21	1.835.302.990	831.576.690
Aset Lain-Lain	C.22	7.090.315.928	11.500.405.790
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(7.704.177.285)	(11.871.882.975)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>1.221.441.633</b>	<b>460.099.505</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>1.343.097.260.592</b>	<b>1.231.001.711.615</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang pada Pihak Ketiga	C.25	-	6.946.200
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	105.678.225	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>105.678.225</b>	<b>6.946.200</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>105.678.225</b>	<b>6.946.200</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.28	1.342.991.582.367	1.230.994.765.415
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>1.342.991.582.367</b>	<b>1.230.994.765.415</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>1.343.097.260.592</b>	<b>1.231.001.711.615</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

### III. LAPORAN OPERASIONAL

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020  
DAN 31 DESEMBER 2019**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31 Des 2020	31 Des 2019
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1.079.169.006	3.431.479.560
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.079.169.006</b>	<b>3.431.479.560</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	29.963.667.833	28.375.942.021
Beban Persediaan	D.3	1.909.346.742	2.418.252.592
Beban Barang dan Jasa	D.4	67.626.170.915	76.644.835.836
Beban Pemeliharaan	D.5	12.026.808.985	3.057.912.251
Beban Perjalanan Dinas	D.6	10.345.507.845	30.387.685.862
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	15.220.740.033	11.481.410.054
Beban Penyisihan Piutang Tak	D.10	(47.425)	-
Beban Lain-lain	D.11	-	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>137.092.194.928</b>	<b>152.366.038.616</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(136.013.025.922)</b>	<b>(148.934.559.056)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	D.12		
Surplus Pelepasan Aset Nonlancar		230.559.121	(49.083.120.100)
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non operasional Lainnya		472.035.793	178.559.806
Pendapatan dari Kegiatan non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>702.594.914</b>	<b>(48.904.560.294)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(135.310.431.008)</b>	<b>(197.839.119.350)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>	D.13		
Pendapatan PNPB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(135.310.431.008)</b>	<b>(197.839.119.350)</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020**  
**DAN 31 DESEMBER 2019**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2020	31 Desember 2019
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	1.230.994.765.415	961.490.164.380
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(135.310.431.008)	<b>(197.839.119.350)</b>
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.2	(50.593.500)	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET	E.3.4	529.978.604	(57.849.464.125)
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.5	(5.758.110.001)	54.205.852.718
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		<b>(5.278.724.897)</b>	<b>(3.643.611.407)</b>
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	252.585.972.857	470.987.331.792
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		111.996.816.952	269.504.601.035
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.5	<b>1.342.991.582.367</b>	<b>1.230.994.765.415</b>

***Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan***

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

*Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana  
Strategis*

BPSDM Hukum dan HAM merupakan ujung tombak organisasi Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal pengembangan Aparatur Hukum dan HAM, sehingga organisasi ini dituntut untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan pengembangan pengetahuan, keterampilan dan sikap ASN agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang hukum dan ham dengan sebaik-baiknya.

Kementerian Hukum dan HAM merupakan Kementerian yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Kementerian Hukum dan HAM memiliki lingkup kerja yang sangat beragam, seperti bidang masyarakat, bidang keimigrasian, bidang kekayaan intelektual, bidang administrasi hukum umum, pembinaan hukum nasional, peraturan perundang-undangan, penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan (P5) hak asasi manusia. Keragaman dan kompleksitas tugas ini tentunya memerlukan berbagai kecakapan dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif maupun teknis yang didasari oleh Ilmu Pengetahuan dan Keterampilan guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di bidang hukum dan HAM, dengan lebih cepat (*faster*), lebih baik (*better*), lebih murah (*cheaper*), dan terbaru (*newer*).

Permasalahan hukum dan HAM di Indonesia semakin dinamis dan kompleks. Masyarakat saat ini memiliki pemahaman dan daya kritis yang cukup tinggi di bidang hukum dan HAM. Perhatian dan tuntutan masyarakat terhadap permasalahan pelayanan tahanan dan warga binaan masyarakat, pelayanan keimigrasian, pelayanan kekayaan intelektual, pelayanan jasa hukum dan penghormatan, perlindungan,

pemajuan, penegakan dan pemenuhan (P5) HAM serta tugas Kementerian Hukum dan HAM lainnya, sehingga bila tidak diantisipasi dan direspon dengan cepat, tepat, akurat dan akuntabel, akan dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi Kementerian Hukum dan HAM. Oleh karena itu, pegawai Kementerian Hukum dan HAM dan pihak lain yang melaksanakan tugas di bidang hukum dan ham, dituntut untuk senantiasa mengembangkan kompetensi dan profesionalismenya dalam pelaksanaan tugasnya dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Kondisi di atas menjadi tantangan bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM untuk mewujudkan seluruh SDM Hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pelatihan teknis substantif, teknis fungsional dan pelatihan hak asasi manusia.

Selain menyelenggarakan kegiatan diklat, BPSDM Hukum dan HAM juga melaksanakan *assessment center* untuk mendapatkan informasi dan pemetaan kompetensi (*soft competency*) yang dimiliki pegawai Kementerian Hukum dan HAM, dan yang dapat digunakan sebagai informasi yang memadai bagi pimpinan untuk keperluan promosi, rotasi, mutasi, pengembangan SDM untuk pembinaan karir pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugasnya juga bertanggung jawab meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Sumber Daya Manusia bukan saja bagi pegawai Kementerian Hukum dan HAM, tetapi juga sumber daya manusia di bidang hukum dan ham yang berada di instansi lain antara lain perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, aparat penegak hukum lainnya untuk Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Sebagai konsekuensi transformasi organisasi, ke depannya BPSDM Hukum dan HAM harus mampu mengantisipasi tantangan tugas pengembangan SDM Hukum dan HAM yang semakin kompleks dalam menghadapi dinamika persoalan

hukum dan HAM masyarakat Indonesia dan internasional. Melalui transformasi organisasi ini, diharapkan kegiatan pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM dapat lebih implementatif, adaptif (*relevan*), mudah diakses, dan berdampak tinggi.

---

**Tujuan :**

“Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia”

**Sasaran :**

---

- Seluruh aparatur Hukum dan HAM memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas.
- Seluruh unit kerja memiliki sumber daya manusia profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi berkesinambungan.

**Kedudukan Tugas dan Fungsi**

---

**Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135):**

## A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Semester II Tahun 2020 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Entitas akuntansi di lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM berjumlah 6 (enam) entitas. Rincian entitas tersebut tersaji sebagai berikut:

### Rekapitulasi Jumlah Entitas UAPPA-E1

No	Kode Es I	Entitas	Jumlah/Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM	1	-	-	-	1
2	12	Politeknik Imigrasi	1	-	-	-	1
3	12	Politeknik Ilmu Pemasarakatan	1	-	-	-	1
4	12	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau	-	1	-	-	1
5	12	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah	-	1	-	-	1

6	12	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara	-	1	-	-	1
<b>Jumlah</b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6</b>

*Basis  
Akuntansi*

### **A.3. Basis Akuntansi**

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing

ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Hukum dan HAM. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-  
LRA*

##### **(1) Pendapatan-LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-LO*

##### **(2) Pendapatan-LO**

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Jasa Giro dan Pendapatan Lain-lain
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Belanja*

**(3) Belanja**

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban*

**(4) Beban**

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## Aset

### (5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

#### Aset Lancar

##### a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%

Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### *Aset Tetap*

##### **b. Aset Tetap**

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan

nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD

### *Penyusutan Aset Tetap*

#### **c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah;
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset

Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang Jangka Panjang*

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

*Aset Lainnya*

• **Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

<b>Kelompok Aset Tak Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat (tahun)</b>
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

## *Kewajiban*

### **(7) Kewajiban**

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

#### a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

#### b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

## *Ekuitas*

### **(8) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode Semester II tahun anggaran 2020, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Revisi yang dilakukan berupa revisi dengan kewenangan Ditjen. Anggaran, Kanwil Perbendaharaan, dan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran serta merubah jumlah PAGU Anggaran DIPA awal. Perincian Anggaran awal dan setelah revisi berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2020	
	ANGGARAN	ANGGARAN
	AWAL	SETELAH REVISI
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Jasa	849.625.000	849.625.000
Pendapatan Lain-lain	-	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>849.625.000</b>	<b>849.625.000</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	9.323.865.000	30.330.246.000
Belanja Barang	65.380.736.000	95.456.978.000
Belanja Bantuan Sosial		0
Belanja Modal	50.689.205.000	108.092.287.000
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>125.393.806.000</b>	<b>233.879.511.000</b>

*Realisasi*

*Pendapatan*

*Rp.1.536.070.852,-*

### B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 1,536.070.852,- atau mencapai 180.79% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.3.436.255.357,- Pendapatan lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan*

Uraian	31 Desember 2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha	30.000.000	427.443.308	1.424,81
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	819.625.000	987.500.000	120,48
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan	-	9.485.000	0
Pendapatan Jasa Lainnya	-	-	-
Pengelolaan Rekening Perbankan	-	463.000	-
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	-	-
Pendapatan Lain-Lain	-	111.179.544	-
<b>Jumlah</b>	<b>849.625.000</b>	<b>1.536.070.852</b>	<b>180,79</b>

Realisasi Pendapatan Semester II TA 2020 mengalami penurunan sebesar 55.30% dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada Semester II TA 2019. Hal ini disebabkan karena pengurangan kegiatan Pelatihan Fungsional Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan (PNBP) menjadi 1 angkatan dan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dilakukan secara Jarak Jauh.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan  
31 Desember TA 2020 dan 31 Desember TA 2019*

URAIAN	REALISASI 31 DES 2020	REALISASI 31 DES 2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	427.443.308	69.084.694	16,16
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	987.500.000	2.449.000.000	248,00
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan	9.485.000	-	100,00
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Denda	463.000	913.388.366	197.276,10
Pendapatan Lain-lain	111.179.544	4.782.297	2224,81
<b>Jumlah</b>	<b>1.536.070.852</b>	<b>3.436.255.357</b>	<b>-55,30</b>

Laporan Realisasi pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Terdapat realisasi pada Akun [425122] Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp.51.299.000,- yaitu berupa hasil lelang kendaraan dinas berupa mobil dan motor milik satker Politeknik Imigrasi.
- Realisasi Akun [425129] Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.50.762.334,- yaitu pelaksanaan lelang inventaris kantor berupa meja kerja kayu, lemari besi, kursi besi dll dan satker Politeknik Imigrasi pelelangan Kendaraan Dinas berupa, mini bus, mobil dan motor sebesar Rp.128.497.787,-.
- Realisasi Akun [425131] Pendapatan sewa Tanah, Gedung dan Bangunan pada satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.94.466.792,-, satker Politeknik Imigrasi sebesar Rp.1.962.873,- dan satker Politeknik Ilmu Pemasarakatan sebesar Rp.100.454.522,-.

- Realisasi Akun [425421] Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan berasal dari satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.987.500.000,- untuk pelaksanaan Pelatihan Fungsional Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan. Untuk Pagu Kegiatan terjadi kesalahan penghitungan dalam penganggaran.
- Realisasi Akun [425791] Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai milik satker Politeknik Imigrasi berupa kehilangan laptop sebesar Rp.9.485.000,-.
- Terdapat Realisasi Akun [425811] Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah oleh Pihak ke 3 pada Badiklat Jawa Tengah sebesar Rp.463.000,-
- Adanya Realisasi Akun [425911] Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp.911.619,- tanpa Estimasi Anggaran dikarenakan pengembalian belanja pegawai berupa pengembalian tunjangan, pembulatan tunjangan, tunjangan Jabatan Fungsional Umum dan tunjangan Struktural, dengan rincian sebagai berikut :
  - Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.725.342,-
  - Satker Akademi Ilmu Pemasarakatan sebesar Rp.1.295,-,
  - Satker Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp.185.000,.
- Adanya Realisasi Akun [425912] Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp.110.267.881,- tanpa Estimasi Anggaran, dengan rincian sebagai berikut:
  - Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.89.217.881,- berupa pengembalian honor pendamping sikap dan prilaku dasar (latsar) CPNS Gol. II dan III Tahun 2019,
  - Satker Akademi Imigrasi sebesar Rp.21.050.000,- berupa pengembalian

pembelian *e-toll* pejabat,

- Realisasi Akun [425999] Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp.44,- pada satker Akademi Imigrasi.

## B.2. BELANJA

*Realisasi*

*Belanja*

*Rp.228.109.528.016,-*

Realisasi Belanja pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.228.109.528.016,- atau 97,53% dari anggaran belanja sebesar Rp.233.879.511.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada Semester II TA 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja  
Semester II TA 2020*

URAIAN	Semester II TA 2020		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Pegawai	30.330.246.000	29.972.443.771	98,82
Belanja Barang	95.456.978.000	90.705.625.873	95,02
Belanja Modal	108.092.287.000	107.433.288.110	99,39
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>233.879.511.000</b>	<b>228.111.357.754</b>	<b>97,53</b>
Pengembalian Belanja		(300.045.710)	-
<b>Total Belanja</b>	<b>233.879.511.000</b>	<b>227.811.312.044</b>	<b>97,41</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program untuk Semester II Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

## Rincian Belanja Berdasarkan Program

### Semester II TA 2020

PROGRAM	Semester II TA 2020		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	233.879.511.000	228.109.528.016	97,53
<b>Total Belanja</b>	<b>233.879.511.000</b>	<b>228.109.528.016</b>	<b>97,53</b>

Dibandingkan dengan Semester II Tahun 2019, Realisasi Belanja pada Semester II TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 59.67%. Hal ini disebabkan penambahan anggaran belanja Modal BPSDM Hukum dan HAM pada TA 2020 dibandingkan dengan TA 2019 yaitu berupa belanja Modal pembelian aplikasi dan software yang akan digunakan sebagai pendukung dalam pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi peserta diklat dan para siswa dan siswi Taruna Politeknik.

### Perbandingan Realisasi Belanja

#### Semester II TA 2020 dan Semester II TA 2019

URAIAN	REALISASI SMT II TA 2020	REALISASI SMT II TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	29.970.614.033	28.368.995.821	5,65
Belanja Barang	90.705.625.873	112.969.916.834	(19,71)
Belanja Modal	107.433.288.110	1.522.018.000	6.958,61
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>228.109.528.016</b>	<b>142.860.930.655</b>	<b>59,67</b>

### B.3 Belanja Pegawai

*Belanja Pegawai* Realisasi Belanja Pegawai Semester II TA 2020 dan Semester II TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.29.970.614.033,- dan Rp.28,368,995,821,- Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah

dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja pegawai Semester II TA 2020 mengalami peningkatan sebesar 5.65% dari Semester II TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya pegawai yang mutasi keluar ataupun masuk BPSDM Hukum dan HAM, pegawai yang menerima kenaikan pangkat dan pegawai yang mutasi menjadi JFT.

*Perbandingan Belanja Pegawai  
Semester II 2020 dan Semester II TA 2019*

URAIAN	REALISASI SMT II TA 2020	REALISASI SMT II TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	29.419.336.771	27.715.074.927	6,15
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	-	-	-
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	553.107.000	661.664.000	(16,41)
Belanja Tunj.Khusus & Belanja Pegawai Transito	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>29.972.443.771</b>	<b>28.376.738.927</b>	<b>5,62</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	(1.829.738)	(7.743.106)	(76,37)
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>29.970.614.033</b>	<b>28.368.995.821</b>	<b>5,65</b>

**B.4 Belanja Barang**

*Belanja Barang*  
Rp. 90.705.625.873,-

Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2020 dan Semester II TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.90.705.625.873,- dan Rp.112,969,916,834,-.

Realisasi Belanja Barang Semester II TA 2020 mengalami penurunan sebesar 19.46% dari Semester II TA 2019. Hal ini disebabkan terjadinya penurunan pagu anggaran Belanja Barang Semester II Tahun 2020 dibandingkan dengan Semester II Tahun 2019 dikarena terkendala waktu pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan pelatihan di masa pandemik berubah/mundur dari jadwal sehingga dilakukan Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh.

*Perbandingan Belanja Barang  
Semester II TA 2020 dan Semester II 2019*

URAIAN	REALISASI SMT II TA 2020	REALISASI SMT II TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	16.591.330.382	9.189.738.645	80,54
Belanja Barang Non Operasional	32.268.004.364	41.689.529.925	(22,60)
Belanja Persediaan	719.490.990	2.641.962.506	(72,77)
Belanja Jasa	18.315.642.469	25.874.906.116	(29,21)
Belanja Pemeliharaan	12.584.591.323	3.295.432.630	281,88
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	10.524.782.317	30.728.228.375	(65,75)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	6.527.200	(100,00)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>91.003.841.845</b>	<b>113.426.325.397</b>	<b>(19,77)</b>
Pengembalian Belanja	(298.215.972)	(456.408.563)	
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>90.705.625.873</b>	<b>112.969.916.834</b>	<b>(19,71)</b>

### **B.5 Belanja Modal**

*Belanja Modal*  
Rp.107.433.288.110,-

Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2020 dan Semester II TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.107.433.288.110,- dan Rp.1.522.018.000,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada Semester II TA 2020 dan Semester II TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 6958.61% dibandingkan Semester II TA 2019 hal ini dikarenakan adanya penambahan Belanja Modal Tanah milik Badiklat Kepulauan Riau, pengadaan Jaringan milik Politeknik Imigrasi, pengadaan peralatan dan mesin dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, pengadaan inventaris kantor serta pembelian Aplikasi yang ada di masing-masing satker BPSDM Hukum dan HAM.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal  
Semester II TA 2020 dan Semester II TA 2019*

URAIAN	REALISASI SMT II TA. 2020	REALISASI SMT II TA. 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	545.800.000	-	#DIV/0!
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.796.531.148	573.212.000	3702,53
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	83.925.521.608	948.806.000	8745,38
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	49.000.000	-	
Belanja Modal Lainnya	1.116.435.354	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>107.433.288.110</b>	<b>1.522.018.000</b>	<b>6958,61</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>107.433.288.110</b>	<b>1.522.018.000</b>	<b>6958,61</b>

**B.5.1 Belanja Modal Tanah**

Realisasi Belanja Modal Tanah Semester II TA 2020 dan Semester II TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.545.800.000,- dan Rp.0,-. Adanya Belanja Modal Pembebasan tanah dan Belanja Modal Pengurukan tanah milik Balai Diklat Pendidikan Kepulauan Riau terletak di Telaga Punggur – Pantai Timur Kabil Batam.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah  
Semester II TA 2020 dan Semester II TA 2019*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI SMT II TA. 2020	REALISASI SMT II TA. 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat	-	-	-
Belanja Modal Pembebasan Tanah	210.295.800,00		
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	335.504.200,00	-	-
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>545.800.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>545.800.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Semester II TA 2020 adalah sebesar Rp.21.796.531.148,-, mengalami kenaikan sebesar 3702.53% bila dibandingkan dengan Semester II TA

2019 sebesar Rp.573.212.000,-. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor dari satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.13.550.324.522,-, Politeknik Imigrasi sebesar Rp.967.010.184,-, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan sebesar Rp.1.374.850.500,-, Balai Diklat Kepulauan Riau sebesar Rp.162.122.000,-, Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp.4.728.273.442,- dan Balai Diklat Sulawesi Utara sebesar Rp.898.980.500,-. Khusus pemasangan peralatan dan mesin Penanganan Pandemi di satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.46.970.000,-. Dan Politeknik Ilmu Pemasaryakatan sebesar Rp.68.000.000,-

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
Semester II TA 2020 dan Semester II TA 2019*

URAIAN	REALISASI SMT II TA. 2020	REALISASI SMT II TA. 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.681.561.148	573.212.000	3682,47
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal BLU	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi	114.970.000	-	100,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>21.796.531.148</b>	<b>573.212.000</b>	<b>3702,53</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>21.796.531.148</b>	<b>573.212.000</b>	<b>3702,53</b>

**B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal Semester II TA 2020 dan Semester II TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.83.925.521.608,- dan Rp.948.806.000,-.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan  
Semester II TA 2020 dan Semester II TA 2019*

URAIAN JENIS BELANJA	SMT II TA. 2020	SMT II TA. 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	83.925.521.608	0	100,00
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	948.806.000	-100,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>83.925.521.608</b>	<b>948.806.000</b>	<b>8745,38</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>83.925.521.608</b>	<b>948.806.000</b>	<b>8745,38</b>

Hal ini disebabkan adanya pembangunan dan renovasi Gedung dan Bangunan dari satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.48.186.174.517,-, Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp.35.330.717.831,- dan Balai Diklat Sulawesi Utara sebesar Rp.408.629.263,-.

#### **B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Semester II TA 2020 dan Semester II TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.49.000.000,- dan Rp.0,-.

*Perbandingan Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Semester II TA 2020 dan Semester II TA 2019*

URAIAN JENIS BELANJA	SMT II TA 2020	SMT II TA 2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi	49.000.000	-	100,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>49.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>49.000.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Pembelian Jaringan sebesar Rp.49.000.000,- milik satker Politeknik Imigrasi berupa pengadaan Aplikasi Jaringan *Online Jurnal System* (OJS).

#### **B.5.5 Belanja Modal Lainnya**

Realisasi Belanja Modal Lainnya Semester II TA 2020 dan Semester II TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.1.116.435.354,- dan Rp.0,-.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Semester II TA 2020 dan Semester II TA 2019*

URAIAN JENIS BELANJA	TA. 2020	TA. 2019	Naik (Turun) %
Belanja <i>Software</i>	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	1.116.435.354	-	100,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>1.116.435.354</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.116.435.354</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>

Pengeluaran yang diperlukan dalam Kegiatan pembentukan **modal** untuk pengadaan / pembangunan **belanja modal lainnya** yang tidak dapat diklasifikasikan dalam akun **belanja modal** tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan Jaringan Jalan, irigasi, dan **lain-lain** yaitu :

- Belanja Aset Tetap Tak Berwujud (ATB) satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.794.384.000,-
- Belanja Software untuk Satker Politeknik Ilmu Pemasarakatan sebesar Rp.148.800.000,-
- Belanja Aset Tetap Renovasi (ATR) Satker Badiklat Jawa Tengah Rp.144.209.054,-
- Belanja software Satker Badiklat Kepulauan Riau sebesar Rp.29.042.300,-

#### **B.6 Belanja Bantuan Sosial**

*Belanja*

*Bantuan Sosial*  
Rp.0,-

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Semester II TA 2020 dan Semester II TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Belanja Bantuan Sosial adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

#### *Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Semester II TA 2020 dan Semester II TA 2019*

URAIAN JENIS BELANJA	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun) %
Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran  
Rp.0,-*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran  
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

Keterangan	Tahun 2020	Tahun 2019
Rekening Bank	-	0
Uang Tunai	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

*Kas di  
Bendahara  
Penerimaan  
Rp.0,-*

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar masing-masing Rp.0,- dan Rp.0,-. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Perbandingan Rincian Kas di Bendahara Penerimaan  
Desember II TA 2020 dan TA 2019*

Keterangan	Tahun 2020	Tahun 2019
Uang Tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya  
dan Setara Kas  
Rp.0,-*

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara

pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas  
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

Keterangan	Tahun 2020	Tahun 2019
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**C.4 Piutang PNBP**

*Piutang PNBP*  
*Rp.55.000.000,-*

Saldo Piutang PNBP per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.55.000.000,- dan Rp.55.000.000,- Piutang PNBP merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBP disajikan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Piutang PNBP  
Semester II TA 2020 dan TA 2019*

Uraian	TH 2020	TH 2019
Piutang PNBP	55.000.000	55.000.000
Piutang Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>55.000.000</b>	<b>55.000.000</b>

Piutang sebesar Rp.55.000.000,- merupakan piutang atas sewa-menyewa gedung ALTRI sekarang menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Litigasi yang masih belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan dan sudah dilakukan penagihan.

### **C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

*Bagian Lancar Tagihan TP/TGR* Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR  
Semester II TA 2020 dan TA 2019*

No	Nama	Tahun 2020	Tahun 2019
1	Bagian Lancar TP	-	-
2	Bagian Lancar TGR	-	-
<b>Jumlah</b>		-	-

### **C.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran**

*Bagian Lancar TPA* Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

### **C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar**

*Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar* Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.275.000,- dan Rp.275.000,-.

Penyisihan piutang tak tertagih – piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Lancar  
Semester II TA 2020*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar	55.000.000	0,50%	275.000
Jumlah	55.000.000		275.000

**C.8 Beban Dibayar di Muka**

*Belanja  
Dibayar di  
Muka  
Rp.0,-*

Saldo Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Beban Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Dibayar di Muka  
Semester II TA 2020 dan TA 2019*

JENIS	TA. 2020	TA. 2019
Pembayaran Internet		
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin		
Pembayaran Sewa Gedung dan Bangunan		
Jumlah	-	-

**C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima**

*Pendapatan  
yang Masih  
Harus Diterima  
Rp.0,-*

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima  
TA 2020 dan 2019*

JENIS	TH 2020	TH 2019
Pendapatan Jasa Pelatihan		
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan		
Pendapatan Jasa Pelayanan dan Pendidikan		
Jumlah	-	-

### C.10 Persediaan

Persediaan  
Rp.736.417.740,-

Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.736.417.740,- dan Rp.948.042.361,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Persediaan  
per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

JENIS	TH 2020	TH 2019
Barang Konsumsi	567.752.386	832.702.203
Barang untuk Pemeliharaan	168.665.354	94.214.700
Suku Cadang	-	-
Bahan Baku	-	-
Persediaan Lainnya	-	21.107.458
<b>Jumlah</b>	<b>736.417.740</b>	<b>948.024.361</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Dokumentasi dan BA Pemeriksaan Barang (stok opname persediaan) terlampir.

### C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan  
TP/TGR  
Rp.0,-

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan GantiRugi (TP/TGR) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

### C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan  
Penjualan  
Angsuran  
Rp.0,-

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-

### C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Non Lancar

Penyisihan  
Piutang Tak  
Tertagih –  
Piutang Non  
Lancar  
Rp.0,-

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Non Lancar per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Penyisihan Piutang tak Tertagih–Piutang Non Lancar merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

### C.14 Tanah

Tanah  
Rp.1.089.000.068.000,-

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.1.089.000.068.000,- dan Rp.1.072.226.368.000,-. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019</b>	<b>Rp</b>	<b>1.072.226.368.000</b>
Mutasi tambah:	Rp	16.773.700.000
Pembelian	Rp	16.773.700.000
Hibah	Rp	-
Transfer	Rp	-
Revaluasi Aset	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	-
Revaluasi Aset	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>Rp</b>	<b>1.089.000.068.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	Rp	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2020</b>	<b>Rp</b>	<b>1.089.000.068.000</b>

- Luas Tanah BPSDM Hukum dan HAM secara keseluruhan 103.770 m<sup>2</sup> terletak di Jl. Raya Gandul No.4 Cinere, Depok.
- Tanah seluas 2.559 m<sup>2</sup> terletak di Jl. Percetakan Negara VII No.27, Rawasari, Jakarta Pusat.

- Asset tanah pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Sulawesi Utara Tanah seluas 3.000m<sup>2</sup> yang didapat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara terletak di Jl. Manembo-nembo Kel. Sagerat Weru Dua Kec. Matuari Kota Bitung Sulawesi Utara.
- Asset tanah pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Jawa Tengah Tanah seluas 51.604m<sup>2</sup> yang didapat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah terletak di Jl. Muhammad Ihksan, Semarang Jawa Tengah.
- Penambahan Asset tanah lainnya pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepulauan Riau seluas 40.000m<sup>2</sup> yang didapat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau terletak di Telaga Punggur – Pantai Timur Kabil Batam dimana status kepemilikan dalam proses sertifikasi Balik Nama di BPN.

### C.15 Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan  
Mesin*  
Rp.77.320.563.531,-

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.77.320.563.531,- dan Rp.52.360.266.470,- Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019</b>	<b>Rp 52.360.266.470</b>
Mutasi tambah:	Rp 25.506.147.006
Pembelian	Rp 21.224.945.948
Hibah	Rp -
Transfer Masuk	Rp 4.275.693.510
Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi	Rp 4.057.548
Pengembangan Nilai Aset	Rp 1.450.000
Mutasi kurang:	Rp 545.849.945
Transfer keluar	Rp 81.423.750
Transaksi normalisasi BMN	Rp 4.057.548
Reklasifikasi Aset	Rp 4.981.666
Penghapusan	Rp 455.386.981
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>Rp 77.320.563.531</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	Rp (48.974.750.936)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2020</b>	<b>Rp 28.345.812.595</b>

Mutasi bertambah mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai berasal dari :

- Satker BPSDM Hukum dan HAM senilai Rp.15.574.209.176,-.
- Satker Politeknik Imigrasi senilai Rp.2.350.948.868,-
- Satker Politeknik Ilmu Pemasarakatan senilai Rp.2.148.309.320,-
- Satker Badiklat Kepulauan Riau senilai Rp.151.242.000,-
- Satker Badiklat Jawa Tengah senilai Rp.4.455.137.142,-
- Satker Badiklat Sulawesi Utara senilai Rp.826.300.500,-

Mutasi kurang mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai berasal dari :

- Satker BPSDM Hukum dan HAM senilai Rp.539.218.279,-.
- Satker Badiklat Jawa Tengah senilai Rp.6.631.666,-

### **C.16 Gedung dan Bangunan**

*Gedung dan  
Bangunan*  
Rp.239.994.199.536,-

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp.239.994.199.536,- dan Rp.149.797.879.335,-.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Pengembangan Melalui KDP	1.231.353.738
Koreksi Penilaian Kembali BMN	1.495.591.938
Reklas Masuk	-
Mutasi kurang:	14.451.766.980
Transaksi Normalisasi BMN	11.072.429.740
Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi Revaluasi	11.495.000
Koreksi Kesalahan Input	965.613.334
Koreksi Semu Hasil Koreksi Hasil Revaluasi	2.402.228.906
Reklasifikasi Gd dan Bangunan	
Koreksi pencatatan	-
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>239.994.199.536</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	(24.084.255.001)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2020</b>	<b>215.909.944.535</b>

- Terdapat Nilai mutasi tambah milik satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.67.413.148.149,- didapat dari :
  - Transfer masuk bangunan ibadah permanen dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan sebesar Rp.8.154.543.895,-.
  - Penambahan Nilai Gedung kelas Politeknik di Tangerang Rp.36.909.711.301,-.
  - Pembangunan tempat parkir di Gandul senilai Rp.10.423.839.750,-.
  - Pembangunan Center Of Excellence di Gandul senilai Rp.822.724.475,-
  - Input Normalisasi senilai Rp.11.072.429.740,- atas Bangunan Gedung Pertemuan Permanen setelah dilakukan normalisasi.
  - Pengembangan bangunan gedung tempat tinggal senilai Rp 29.898.988,-
- Penambahan Nilai Gedung milik satker Badiklat Jawa Tengah sebesar Rp.35.330.717.831,-.
- Penambahan Nilai Gedung milik satker Badiklat Sulawesi Utara akibat renovasi gedung kantor sebesar Rp.408.629.263,-.
- Koreksi Penilaian Kembali BMN terdapat pada Satker Poltekip senilai Rp1.495.591.938,- atas Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 1 dan Gedung Pos Jaga Permanen NUP 1.

### C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan

*Jalan, Irigasi dan Jaringan*  
Rp.9.444.644.993,-

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.9.444.644.993,- dan Rp.9.395.644.993,-

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>9.395.644.993</b>
Mutasi tambah:	-
Pembelian	49.000.000
Revaluasi Aset	-
Mutasi kurang:	
Revaluasi Aset	-
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>9.444.644.993</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020	(3.050.937.901)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2020</b>	<b>6.393.707.092</b>

- Pembelian Jaringan sebesar Rp.49.000.000,- milik satker Politeknik Imigrasi berupa pengadaan Aplikasi Jaringan *Online Jurnal System* (OJS).

### C.18 Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap Lainnya*  
Rp.2.972.643.997,-

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp.2.972.643.997,- dan Rp.2.972.643.997,-.

<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>2.972.643.997</b>
Mutasi tambah:	-
Transfer Masuk	-
Mutasi kurang:	
Penyelesaian Pembangunan	-
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>2.972.643.997</b>
Akumulasi Penyusutan s.d.31 Desember 2020	(1.537.500.000)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2020</b>	<b>1.435.143.997</b>

Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya antara lain koleksi perpustakaan (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/ kebudayaan, sebesar Rp.2.972.643.997,- (data terlampir) berasal dari :

- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.1.351.026.622,-
- Satker Politeknik Ilmu Pemasaryakatan sebesar Rp.867.743.575,-
- Satker Politeknik Imigrasi sebesar Rp.753.873.800,-

### C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan

*Konstruksi  
Dalam  
Pengerjaan  
Rp.0,-*

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,- yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca

### C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi  
Penyusutan  
Aset Tetap  
Rp.77.647.443.838,-*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing Rp.77.647.443.838,- dan Rp.57.213.958.046,-.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

#### *Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	77.320.563.531	48.974.750.936	28.345.812.595
2	Gedung dan Bangunan	239.994.199.536	24.084.255.001	215.909.944.535
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.444.644.993	3.050.937.901	6.393.707.092
4	Aset Tetap Lainnya	2.972.643.997	1.537.500.000	1.435.143.997
<b>Total</b>		<b>329.732.052.057</b>	<b>77.647.443.838</b>	<b>252.084.608.219</b>

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada lampiran.

Aset Tak  
Berwujud  
Rp.1.835.302.990,-

### C.21 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.1.835.302.990,- dan Rp.831.576.690,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan terdapat pada lampiran. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Aset Tak Berwujud  
Semester II TA 2020*

No.	Uraian	Nilai
1	Software Komputer	Rp 1.835.302.990
2	ATB Lainnya	Rp -
Jumlah Nilai Perolehan per 31 Desember 2020		Rp 1.835.302.990

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>Rp 831.576.690</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
pembelian	Rp 1.003.726.300
Transfer Masuk	Rp -
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>Rp 1.835.302.990</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2020	Rp 923.667.478
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2020</b>	<b>Rp 911.635.512</b>

Penggunaan Aset tak Berwujud sebesar Rp.990.325.490,- yang dicatat sebagai asset dengan sumber daya jangka panjang yang biasanya tidak memiliki keberadaan fisik namun memiliki nilai atau jumlah manfaat di masa depan yang tidak diketahui (tidak terbatas) terdapat pada :

- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.81.875.000,- berupa :
  - a. barcode : digunakan untuk memberi tanda pada BMN yang berada di lingkungan BPSDM
  - b. CBHRIS : aplikasi kediklatan
- Satker Politeknik Imigrasi sebesar Rp.599.608.190,- berupa Software komputer pada laboratorium keimigrasian.
- Satker Politeknik Ilmu Pemasarakatan Rp.248.300.000,-

berupa Aplikasi layanan Taruna pada bagian akademik dan ketarunaan sebagai sarana perizinan taruna keluar asrama dan kegiatan luar maupun dalam asrama, media informasi kedinasan POLTEKIP bagi taruna dan sarana layanan aduan.

- Satker Badiklat Kepulauan Riau sebesar Rp.29.042.300,- berupa Aplikasi COP untuk Pelatihan diklat
- Modul aplikasi Self assesment Rumah Belajar ASN Rp.88.350.000,-
- Modul aplikasi Self Service Rumah Belajar ASN Rp.83.900.000,-
- Manajemen diklat Rumah Belajar ASN Rp.88.800.000,-
- Modul Aplikasi Learning Journey Rp.90.090.000,-
- Modul Digital Library Rp.87.780.000,-
- Aplikasi E-learning Rp.90.502.000,-
- Modul Sertifikasi dan pelatihan Rp.93.857.000,-
- Modul community of Practive Rp.88.660.000,-
- modul aplikasi rumah belajar ASN Rp.82.445.000,-
- Aplikasi peserta Diklat di Pusat Penilaian Kompetensi sebesar Rp.50.593.500,-

### C.22 Aset Lain-Lain

*Aset Lain-Lain*  
Rp.7.090.315.928,-

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp.7.090.315.928,- dan Rp.11.500.405.790,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPSDM Hukum dan HAM serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2019</b>	<b>11.500.405.790</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Penghentian Aset dr penggunaan	4.981.666
<b>Mutasi kurang:</b>	
Penghapusan BMN	4.415.071.528
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>7.090.315.928</b>
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2020	(6.780.509.807)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2020</b>	<b>309.806.121</b>

### C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi  
Penyusutan  
dan Amortisasi  
Aset Lainnya  
Rp.7.704.177.285,-*

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.7.704.177.285,- dan Rp.11.871.882.975,- Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya*

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud			
1	Software Komputer	1.835.302.990	923.667.478	911.635.512
2	ATB Lainnya			-
<b>Jumlah</b>		<b>1.835.302.990</b>	<b>923.667.478</b>	<b>911.635.512</b>
B	Aset Lainnya	7.090.315.928	6.780.509.807	309.806.121
<b>Jumlah</b>		<b>7.090.315.928</b>	<b>6.780.509.807</b>	<b>309.806.121</b>
<b>Total</b>		<b>8.925.618.918</b>	<b>7.704.177.285</b>	<b>1.221.441.633</b>

### C.24 Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka  
dari KPPN  
Rp.0,-*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

### C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada  
Pihak Ketiga  
Rp.0,-*

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan akan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari belanja pegawai yang masih harus dibayar berupa uang makan bulan November dan Desember 2019 pada Balai Diklat Sulawesi Utara dan segera akan ditindaklanjuti.

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada lingkup per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga*

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	Rp -
2	Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor	Rp -
3	Potongan Pajak yang belum disetor	Rp -
4	Utang kepada Pihak Lainnya	Rp -
<b>Total</b>		<b>Rp -</b>

**C.26 Pendapatan Diterima di Muka**

*Pendapatan Diterima di Muka Rp.105.678.225,-*

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp.105.678.225,- dan Rp.0,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBK. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

*Rincian Pendapatan Diterima di Muka Semester II TA 2020*

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Badan Swasta	Rp 105.678.225	
Instansi Pemerintah Lainnya	Rp -	
Badan Lainnya	Rp -	
<b>Total</b>	<b>Rp 105.678.225</b>	

Pendapatan diterima dimuka diterima sebesar Rp.105.678.225,- didapat dari satker :

- BPSDM hukum dan HAM senilai Rp17.343.066,-didapat dari sewa ATM Bank Mandiri Tahun kedua.
- Politeknik Ilmu Pemasarakatan senilai Rp.88.335.159,- didapat dari sewa Gedung di Jalan Percetakan Negara VII No.27 Jakarta Pusat yang disewakan untuk Kampus STIH Litigasi

*Beban yang  
Masih harus  
Dibayar  
Rp.0,-*

### **C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar**

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar  
Semester II TA 2020 dan TA 2019*

<b>Keterangan</b>	<b>TH 2020</b>	<b>TH 2019</b>
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar		
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar		
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Ekuitas  
Rp.1.342.91.582.367,-*

### **C.28 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.1.342.991.582.367,- dan Rp.1.230.994.765.415,-. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Pendapatan  
PNBP  
Rp.1.079.169.006,-*

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.1.079.169.006,- dan Rp.3.431.479.560,- Pendapatan tersebut terdiri dari:

#### *Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2020 dan 2019*

URAIAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	91.205.962	69.084.694	75,75
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	987.500.000	2.449.000.000	248,00
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	463.000	913.388.366	197.276,10
Pendapatan Anggaran Lain-lain	44	6.500	14.772,73
<b>Jumlah</b>	<b>1.079.169.006</b>	<b>3.431.479.560</b>	<b>317,97</b>

### D.2 Beban Pegawai

*Beban Pegawai  
Rp.29.963.667.833,-*

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.29.963.667.833,- dan Rp.28.375.942.021,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Perbandingan Rincian Beban Pegawai  
Semester II TA 2020 dan Semester II TA 2019*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	20.207.200.040	27.714.278.021	(27)
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	-1.488		
Beban Pembulatan Gaji PNS	300.818		
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	1.347.031.026		
Beban Tunjangan Anak PNS	355.497.108		
Beban Tunjangan Struktural PNS	941.300.000		
Beban Tunjangan Fungsional PNS	1.512.700.000		
Beban Tunjangan PPh PNS	105.902.039		
Beban Tunjangan Beras PNS	921.107.740		
Pengembalian Beban Tunjangan Beras PNS	-50.400		
Beban Uang Makan PNS	3.455.021.800		
Pengembalian Beban Uang Makan PNS	-667.850	661.664.000	(100)
Beban Tunjangan Umum PNS	566.330.000		
Umum PNS	-1.110.000		
Beban Uang Lembur	553.107.000	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>29.963.667.833</b>	<b>28.375.942.021</b>	<b>6</b>

### **D.3 Beban Persediaan**

*Beban Persediaan* Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.1.909.346.742,- dan Rp.2.418.252.592,-.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Persediaan  
TA 2020 dan TA 2019*

URAIAN JENIS BEBAN	SMT II TH 2020	SMT II TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	1.909.346.742	1.723.119.174	10,81
Beban Persediaan pita cukai, materau, dan leges	0	0	-
Beban Persediaan Bahan Baku	0	295.431.398	(100,00)
Beban Persediaan Lainnya	-	399.702.020	(100,00)
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>1.909.346.742</b>	<b>2.418.252.592</b>	<b>(21,04)</b>

#### **D.4 Beban Barang dan Jasa**

*Beban Barang dan Jasa*  
Rp.67.626.170.915,-

Beban Barang dan jasa pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.67.626.170.915,- dan Rp.76.644.835.836,-.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa  
Semester II TA 2020 dan Semester II TA 2019*

URAIAN	TH 2020	TH 2019	% Naik (TURUN)
Beban Barang Operasional	12.348.178.312	9.189.738.645	34
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	4.243.152.070		-
Beban Barang Non Operasional	31.199.748.139	41.672.389.925	(25)
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1.063.251.225		
Beban Langganan Daya dan Jasa	3.126.965.026	2.868.827.112	9
Beban Sewa	3.761.037.443	7.056.082.004	(47)
Beban Jasa Konsultan	-	-	-
Beban Jasa Profesi	10.582.668.500	14.319.973.150	(26)
Beban Jasa Lainnya	667.240.000	1.537.825.000	(57)
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	60.595.000		
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	573.335.200	-	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>67.626.170.915</b>	<b>76.644.835.836</b>	<b>(12)</b>

#### D.5 Beban Pemeliharaan

*Beban Pemeliharaan*  
Rp.12.026.808.985,-

Beban pemeliharaan pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.12.026.808.985,- dan Rp.3.057.912.251,-. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan  
Semester II TA 2020 dan Semester II TA 2019*

URAIAN	SMT II TH 2020	SMT II TH 2019	% Naik (TURUN)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.815.598.108	516.528.141	1.607
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi	49.275.000		
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.433.880.432	2.341.428.272	4
Beban Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	-	-	
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	728.055.445	155.821.838	367
Beban Persediaan Suku Cadang	-	44.134.000	
<b>Jumlah</b>	<b>12.026.808.985</b>	<b>3.057.912.251</b>	<b>293</b>

#### D.6 Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan Dinas*  
Rp.10.345.507.845,-

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.10.345.507.845,- dan Rp.30.387.685.862,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas  
Semester II TA 2020 dan Semester II TA 2019*

URAIAN JENIS BEBAN	SMT II TH 2020	SMT II TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	7.871.134.856	24.299.976.082	-67,61
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	705.984.000	1.622.239.980	-56,48
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	568.504.500	1.269.620.000	-55,22
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.199.884.489	3.189.322.600	-62,38
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	6.527.200	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>10.345.507.845</b>	<b>30.387.685.862</b>	<b>-65,95</b>

Beban Barang  
untuk  
Diserahkan  
kepada  
Masyarakat  
Rp.0,-

#### D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat  
Semester II TA 2020 dan Semester II TA 2019*

URAIAN JENIS BEBAN	SMT II TH 2020	SMT II TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan  
Sosial  
Rp.0,-

Beban Bantuan Sosial 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Rincian Beban bantuan sosial untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Bantuan Sosial  
Semester II TA 2020 dan Semester II TA 2019*

URAIAN	SMT II TH 2020	SMT II TH 2019	% Naik (TURUN)
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	-	-	-
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp.15.220.740.033,-

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.15.220.740.033,- dan Rp.11.481.410.054,-. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
Semester II TA 2020 dan Semester II TA 2019*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	SMT II TH 2020	SMT II TH 2019	% Naik (TURUN)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	7.692.460.149	5.036.701.524	53
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.454.644.867	5.495.185.550	17
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	881.844.345	881.231.845	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	4.153.750	(100)
Jumlah Penyusutan	<b>15.028.949.361</b>	<b>11.417.272.669</b>	32
Beban Amortisasi Aplikasi	-	-	-
Beban Amortisasi Software	166.497.038	37.343.750	-
Beban Amortisasi ATB Lainnya	-	-	-
Jumlah Amortisasi	<b>166.497.038</b>	<b>37.343.750</b>	346
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	-	-	-
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yg Tdk Digunakan	25.293.634	26.793.635	-
Jumlah	<b>15.220.740.033</b>	<b>11.481.410.054</b>	33

### D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih Rp.47.425,-

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.47.425,- dan Rp.0,-. Rincian Beban

Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Semester II TA 2020 dan Semester II TA 2019*

URAIAN JENIS BEBAN	SMT II TH 2020	SMT II TH 2019	% Naik (TURUN)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	47.425	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>47.425</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**D.11 BEBAN LAIN-LAIN**

*Beban Lain-lain Rp.0,-*

Jumlah Beban Lain-lain untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

**D.12 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**

*Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp.472.035.793,-*

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Semester II TA 2020 dan Semester II TA 2019*

URAIAN	SMT II TH 2020	SMT II TH 2019	NAIK (TURUN) %
Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	542.823.729	685.418.537	-20,80
Beban dari Keg. Non Operasional Lainnya	70.787.936	506.858.731	-86,03
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan *)	-	-	-
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan *)	-	-	-
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>472.035.793</b>	<b>178.559.806</b>	<b>164,36</b>

*\*) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode*

*Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO) mulai tahun 2020.*

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional didapat dari:

Pendapatan pelepasan Aset Non Lancar yang terdiri dari

- Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (Rp.51.299.000,-)
  - Politeknik Ilmu Imigrasi (Rp-51.299.000,-)
- Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya (Rp.179.260.121,-)
  - BPSDM Hukum dan HAM Rp.50.762.334
  - Politeknik Ilmu Imigrasi (Rp.128.497.787,-)

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya terdiri dari :

1. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL (425911) sebesar Rp.911.619,-, terdiri dari :
  - a. BPSDM Hukum dan HAM Rp.725.324,-
  - b. Akademi Ilmu Pemasarakatan Rp.1.295,-
  - c. Balai Diklat Jawa Tengah Rp.185.000,-
2. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL (425912) sebesar Rp.110.267.881,- terdiri dari :
  - a. BPSDM Hukum dan HAM Rp.89.217.881,-
  - b. Akademi Imigrasi Rp.21.050.000,-
3. Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan (491511) sebesar Rp.431.644.229,-, terdiri dari :
  - a. BPSDM Hukum dan HAM Rp.425.990.279,-
  - b. Akademi Ilmu Pemasarakatan Rp.4.433.800,-
  - c. Balai Diklat Kepulauan Riau Rp.331.000,-
  - d. Balai Diklat Jawa Tengah Rp.235.250,-
  - e. Balai Diklat Sulawesi Utara Rp.653.900,-

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya (593311) didapat dari penjualan aset lewat penghapusan pada :

- BPSDM Hukum dan HAM Rp.60.013.836,-
- Satker Akademi Ilmu Pemasarakatan Rp.9.771.000,-
- Satker Balai Diklat Kepulauan Riau Rp.676.200,-

- Satker Balai Diklat Jawa Tengah Rp.159.000,-
- Satker Balai Diklat Sulawesi Utara Rp.167.900,-

#### **D.13 POS-POS LUAR BIASA**

*Pos-Pos Luar Biasa  
Rp.0,-*

Pos Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos-Pos Luar Biasa untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pos-pos Luar Biasa  
Semester II TA 2020 dan Semester II TA 2019*

URAIAN	SMT II TH 2020	SMT II TH 2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
<b>Defisit Pos Luar Biasa</b>	-	-	-

## **E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

### **E.1 Ekuitas Awal**

*Ekuitas Awal*  
*Rp.1.230.994.765.415,-*

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.1.230.994.765.415,- dan Rp.961,490,164,38,-.

### **E.2 Surplus/Defisit LO**

*Surplus/Defisit*  
*LO*  
*Rp.135.310.431.008,-*

Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah defisit sebesar Rp.135.310.431.008,- dan Rp.197.839.119.350,-. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

### **E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar**

*Dampak*  
*Kumulatif*  
*Perubahan*  
*Kebijakan*  
*Akuntansi/Kesalahan*  
*Mendasar*  
*Rp.0,-*

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp.0,-.

#### **E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset**

*Penyesuaian*  
*Nilai Aset*  
*Rp.0,-*

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

#### **E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan**

*Koreksi Nilai*  
*Persediaan*  
*Rp.0,-*

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-.

Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Koreksi Nilai Persediaan*

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Barang Persediaan untuk Pemeliharaan	-
Barang Persediaan Lainnya	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

**E.3.3 Koreksi Reklasifikasi Aset**

*Koreksi  
Reklasifikasi  
Aset  
Rp.50.593.500,-*

Reklasifikasi aset adalah pemindahan kelompok aset tetap ke aset lainnya. Koreksi reklasifikasi aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 50.593.500,- dan Rp0,00. Dari Satker BPSDM Hukum dan HAM berupa reklasifikasi atas Aset Tak Berwujud menjadi software pada BPSDM Hukum dan HAM.

**E.3.4 Selisih Revaluasi Aset**

*Selisih  
Revaluasi Aset  
Rp.529.978.604,-*

Selisih Revaluasi Aset merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset. Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.529.978.604,- dan (Rp.57.849.464.125,-). Terdapat selisih di satker Politeknik Ilmu Pemasarakatan untuk Tanah, Gedung dan Bangunan berupa tanah seluas 2.559m<sup>2</sup> dan bangunan seluas 2.425m<sup>2</sup> berlokasi di Jalan Percetakan Negara VII No.27 Jakarta Pusat yang disewakan untuk Kampus STIH Litigasi.

**E.3.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi**

*Koreksi Aset  
Tetap Non  
Revaluasi  
(Rp.5.758.110.001,-)*

Koreksi Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar (Rp.5.758.110.001,-) dan Rp.54.205.852.718,-. Koreksi Nilai Aset Non revaluasi didapat dari satker Politeknik ilmu Pemasarakatan untuk Tanah, Gedung dan Bangunan berupa tanah seluas 2.559m<sup>2</sup> dan bangunan seluas 2.425m<sup>2</sup>

berlokasi di Jalan Percetakan Negara VII No.27 Jakarta Pusat yang disewakan untuk Kampus STIH Litigasi.

### **E.3.6 Koreksi Lain-lain**

*Koreksi Lain-lain*  
*Rp.0,-*

Koreksi Lain-Lain untuk periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.0,- dan Rp.0,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

#### *Rincian Koreksi Lain-Lain*

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

*Transaksi Antar Entitas*  
*Rp.252.585.972.857,-*

### **E.4 Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.252.585.972.857,- dan Rp.470.987.331.792,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

#### *Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas*

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(1.536.070.852)
Ditagikan ke Entitas Lain	228.109.528.016
Transfer Masuk	26.126.709.747
Transfer Keluar	(114.194.054)
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
<b>Jumlah</b>	<b>252.585.972.857</b>

#### **E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2020, DDEL sebesar (Rp.1.536.070.852,-) sedangkan DKEL sebesar Rp.228.109.528.016,-.

#### **E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.26.126.709.747,- sedangkan Transfer Keluar sebesar (Rp.114.194.054,-).

#### **E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung**

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.0,-

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp.0,-

#### **E.5 Ekuitas Akhir**

*Ekuitas Akhir*  
Rp.1.342.991.582.  
367,-

Nilai ekuitas pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.1.342.991.582.367,- dan Rp.1.230.994.765.415,-.

## **F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA**

### **F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

1. Terdapat Jurnal Tidak Lazim pada Eselon I BPSDM Hukum dan HAM tercatat pada Jurnal Penyesuaian sebagai asset ekstakomtabel karena harga satuan pembelian barang kurang dari Rp.1.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

a. BPSDM Hukum dan HAM terdapat Jurnal Tidak Lazim dengan Nominal sebagai berikut :

- Sebesar Rp.71.148.000,- untuk Pembelian berupa kursi besi/metal.
- Atas pembelian aset dibawah nilai kapitalisasi berupa pembelian meja kayu Rp.238.000,-.
- Pembelian aset dibawah nilai kapitalisasi berupa pembelian router Rp.2.962.080,-.
- Pembelian aset dibawah nilai kapitalisasi berupa pembelian router Rp.11.848.320,-.
- Rp.990.000,- digunakan untuk pembelian teko listrik harga Rp.495.000,- sebanyak 2 unit;
- Rp.30.690.000,- untuk pembelian Voice Record sebanyak 30 unit seharga Rp.990.000,- total Rp.29.700.000,- dan pembelian teko listrik harga Rp.495.000,- sebanyak 2 unit total Rp.990.000,-
- Rp.95.562.500,- digunakan untuk pembelian Kursi Besi seharga Rp.468.000,- sebanyak 200 unit;

b. Balai Diklat Kepulauan Riau sebesar Rp.10.880.000,- digunakan untuk pembelian Kursi besi, HT, Standing mic, mic, Microphone standing mic, dll.

c. Balai Diklat Jawa Tengah dengan Nominal sebagai berikut:

- Rp.1.160.300,- untuk pembelian Hiasan Bunga/Daun Imitasi, Pot Bunga dan Tongkat

Alumunium;

- Rp.1.760.000,- untuk pembelian Kitchen Set dan Lemari Pendek.
- Rp.270.216.000,- untuk pembelian kursi besi,meja kerja Dosen dan kursi plastik.

d. Jurnal Tidak Lazim Balai Diklat Sulawesi Utara dengan Nominal sebagai berikut:

- Nominal sebesar Rp.3.200.000,-, diperuntukkan untuk pembelian Thermogun dan mesin penyemprot disinfektan.
- Sebesar Rp.34.700.000,- diperuntukkan untuk pembelian White board, Kursi Besi dan Unit Power Supply.
- Nominal sebesar Rp.41.180.000,- pembelian kursi rapat, kursi menghadap dan UPS.

2. Terdapat Resiprokal sebesar Rp.47.150.000,- di Badiklat Jawa Tengah yang merupakan pendapatan dari pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU kegiatan yang dilaksanakan oleh Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang.

3. Adanya Rekonsiliasi SP2D BMN Akun 53 milik satker Badiklat Jawa Tengah dikarenakan penginputan 2 (dua) akun yang berbeda dalam 1 (satu) spm sehingga terjadi pencatatan yang berbeda, dimana akun 5321 pada aplikasi SAIBA dicatat sebesar Rp.1.650.000,- sedangkan pada aplikasi SIMAK Rp.25.314.305,- dan untuk akun 5331 pada aplikasi SAIBA dicatat sebesar Rp.23.664.305,- dan pada aplikasi SIMAK dicatat 0.

4. Terdapat Transfer Keluar/Transfer Masuk senilai Rp.112.709.054,- pada satker Badiklat Jawa Tengah didapat dari Kanwil Jawa Tengah yang tidak dicatatkan berupa Aset Tetap Renovasi karena akan menimbulkan NUP Gedung dan Bangunan yang baru. Pada Badiklat Sulawesi Utara terdapat transfer keluar/masuk senilai

Rp.261.250,- diakibatkan kesalahan penggunaan kode akun sehingga nama satker tidak ada.

5. Laporan Realisasi pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Terdapat realisasi pada Akun [425122] Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp.51.299.000,- yaitu berupa hasil lelang kendaraan dinas berupa mobil dan motor milik satker Politeknik Imigrasi.
- Realisasi Akun [425129] Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.50.762.334,- yaitu pelaksanaan lelang inventaris kantor berupa meja kerja kayu, lemari besi, kursi besi dll dan satker Politeknik Imigrasi pelelangan Kendaraan Dinas berupa, mini bus, mobil dan motor sebesar Rp.128.497.787,-.
- Realisasi Akun [425131] Pendapatan sewa Tanah, Gedung dan Bangunan pada satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.94.466.792,-, satker Politeknik Imigrasi sebesar Rp.1.962.873,- dan satker Politeknik Ilmu Pemasarakatan sebesar Rp.100.423.522,-.
- Realisasi Akun [425421] Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan berasal dari satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.987.500.000,- untuk pelaksanaan Pelatihan Fungsional Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan. Untuk Pagu Kegiatan terjadi kesalahan penghitungan dalam penganggaran.
- Realisasi Akun [425791] Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai milik satker Politeknik Imigrasi berupa kehilangan laptop sebesar Rp.9.485.000,-.
- Adanya Realisasi Akun [425911] Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp.911.619,- tanpa Estimasi Anggaran dikarenakan pengembalian belanja pegawai berupa pengembalian tunjangan, pembulatan tunjangan, tunjangan Jabatan Fungsional Umum dan tunjangan Struktural, dengan

rincian sebagai berikut :

- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.911.619,-
  - Satker Akademi Ilmu Pemasarakatan sebesar Rp.1.295,-,
  - Satker Balai Diklat Jawa Tengah sebesar Rp.185.000,.
- Adanya Realisasi Akun [425912] Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp.110.267.881,- tanpa Estimasi Anggaran, dengan rincian sebagai berikut:
- Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.89.217.881,- berupa pengembalian honor pendamping sikap dan prilaku dasar (latsar) CPNS Gol. II dan III Tahun 2019,
  - Satker Akademi Imigrasi sebesar Rp.21.050.000,- berupa pengembalian pembelian e-toll pejabat,
- Realisasi Akun [425999] Pendapatan Anggaran Lain-lain sebesar Rp.44,- pada satker Akademi Imigrasi.
6. Piutang Bukan Pajak sebesar Rp.55.000.000,- untuk sewa Gedung dan Bangunan milik satker Politeknik Ilmu Pemasarakatan sesuai Surat Penyelesaian piutang sewa gedung STIH Litigasi (tindak lanjut BPK). Surat penagihan BPSDM Hukum dan HAM Nomor SDM.1-KU.05.01-04 tanggal 1 Februari 2021 karena Surat Perjanjian Sewa Sementara Tahun 2016 belum diperbaharui dan berdasarkan nilai perhitungan KPKNL terjadi perubahan penetapan biaya sewa. Yayasan Pengayoman Warga Kemeterian Hukum dan HAM telah melakukan pembayaran untuk menyelesaikan piutang tersebut untuk periode 2016 – 2019 ke Kas Negara melalui Bendahara Pengeluaran Politeknik Ilmu Pemasarakatan sebesar Rp.55.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) dengan Nomor NTPN BA94555DEDCFLN pada tanggal 11 Februari 2021.

7. Aset Tetap pada POLTEKIP berupa tanah seluas 2.559m<sup>2</sup> dan bangunan seluas 2.425m<sup>2</sup> berlokasi di Jalan Percetakan Negara VII No.27 Jakarta Pusat yang disewakan untuk Kampus STIH Litigasi yang saat ini dalam proses penagihan uang sewanya (Surat penagihan BPSDM Hukum dan HAM Nomor SDM.I-PW.01-16 tanggal 30 Oktober 2019). Berdasarkan SEK-53.PB.04.02 tanggal 2 April Tahun 2020 telah dilakukan pembayaran ke Kas Negara melalui Bendahara Pengeluaran Politeknik Ilmu Pemasaryakatan dengan Nomor NTPN 534007QLTJRLB12 tanggal 3 Juni 2020 sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
8. Jaminan Pemeliharaan terhadap beberapa pekerjaan/pengadaan barang dan jasa ditetapkan selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 30 Juni 2021.
9. Terdapat Realisasi pembayaran uang komunikasi dan uang TID (Tunjangan Ikatan Dinas) selama 2 (dua) bulan yang belum terselasaikan oleh bendahara pengeluaran satker Politeknik Ilmu Pemasaryakatan yang saat ini yang bersangkutan dalam proses pemeriksaan.

## **F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

- I. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap pos-pos dalam laporan keuangan antara lain :
  - a. Penyesuaian anggaran dan Penambahan Output dalam kegiatan pada masa pandemik.
  - b. Perubahan Pelatihan teknis metode klasikal menjadi Metode *E-Learning* dan Pelatihan Jarak Jauh sebagai upaya untuk mencegah penyebaran dan menekan dampak yang ditimbulkan Covid-19.
  - c. Adanya tambahan anggaran belanja untuk pemeliharaan gedung dan bangunan khusus untuk masa pandemik.
  - d. Capaian output strategis dan penjelasan Refocusing

Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) sudah dilakukan sesuai target dan penganggaran untuk pelaksanaan sesuai dengan akun yang telah dianggarkan sejak awal tahun 2020.

## II **LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19**

(Dalam Rupiah)

AKUN	URAIAN	SMT I TA 2020		% thd Angg
		ANGGARAN	REALISASI	
52	BELANJA BARANG			
5211	Belanja Barang Operasional			
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	4.547.890.000	4.243.152.070	93,30
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211</b>	<b>4.547.890.000</b>	<b>4.243.152.070</b>	<b>93,30</b>
5212	Belanja Barang Non Operasional			
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	1.297.905.000	1.067.501.225	100,00
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212</b>	<b>1.297.905.000</b>	<b>1.067.501.225</b>	<b>93,30</b>
5218	Belanja Barang Persediaan			
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	14.000.000	14.000.000	93,30
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218</b>	<b>14.000.000</b>	<b>14.000.000</b>	<b>93,30</b>
5221	Belanja Jasa			
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	73.550.000	60.595.000	93,30
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221</b>	<b>73.550.000</b>	<b>60.595.000</b>	<b>93,30</b>
5231	Belanja Pemeliharaan			
521134	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan- Penanganan Pandemi	50.000.000	49.275.000	98,55
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231</b>	<b>50.000.000</b>	<b>49.275.000</b>	<b>98,55</b>
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	115.970.000	114.970.000	99,14
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321</b>	<b>115.970.000</b>	<b>114.970.000</b>	<b>99,14</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>6.099.315.000</b>	<b>5.549.493.295</b>	<b>90,99</b>

- Realisasi Belanja barang operasional – penanganan Pandemi (521131) Rp.4.547.890.000,-, terdiri dari : Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.2.954.624.118,-, satker Politeknik Imigrasi sebesar Rp.886.010.650,-, Satker Politeknik Ilmu Pemasarakatan sebesar Rp.351.396.990,-, satker Badiklat Kepulauan Riau Rp.36.357.500,-, satker Badiklat Jawa Tengah sebesar Rp.14.762.812,- dan satker Badiklat Sulawesi Utara sebesar Rp.9.499.400,-.

- Realisasi Belanja barang non operasional – penanganan Pandemi (521241) Rp.1.297.905.000,-, berasal dari Satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.361,440,879,-, satker Politeknik Ilmu Pemasarakatan sebesar Rp.604.800.000,-, satker Badiklat Kepulauan Riau sebesar Rp.54.031.596,-, satker Badiklat Jawa Tengah Rp.36.679.350,- dan satker Badiklat Sulawesi Utara sebesar Rp.14.000.000,-.
- Realisasi Belanja Jasa Penanganan Pandemi (522192) sebesar Rp.60.595.000,- berasal dari satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.20.795.000,-, satker Badiklat Kepulauan Riau sebesar Rp.16.950.000,- dan satker Badiklat Sulawesi Utara Rp.22.850.000,-
- Realisasi Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan – penanganan Pandemi (521134) Rp.49.275.000,-, berasal dari Satker BPSDM Hukum dan HAM.
- Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Penanganan Pandemi (532119) sebesar Rp.114.970.000,- berasal dari satker BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp.46.970.000,-, satker Politeknik Ilmu Pemasarakatan sebesar Rp.68.000.000,-

III. Pengajuan Perubahan Semula Menjadi terhadap pandemic Covid-19 satker BPSDM Hukum dan HAM dilampirkan pada data (terlampir).

## VI. LAMPIRAN DAN DAFTAR

**NERACA**  
**TINGKAT ESELON I**  
**PER DESEMBER 2020 DAN 2019**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : 12

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

Tgl. Cetak 03/03/2021 12:53 PM  
lap\_neraca\_es1\_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2020	2019	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Piutang Bukan Pajak	55,000,000	55,000,000	0	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	(275,000)	(275,000)	0	0.00
<b>PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)</b>	<b>54,725,000</b>	<b>54,725,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
Persediaan	736,417,740	948,042,361	(211,624,621)	(22.32)
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>791,142,740</b>	<b>1,002,767,361</b>	<b>(211,624,621)</b>	<b>(21.10)</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	1,089,000,068,000	1,072,226,368,000	16,773,700,000	1.56
Peralatan dan Mesin	77,320,563,531	52,360,266,470	24,960,297,061	47.67
Gedung dan Bangunan	239,994,199,536	149,797,879,335	90,196,320,201	60.21
Jalan, Irigasi dan Jaringan	9,444,644,993	9,395,644,993	49,000,000	0.52
Aset Tetap Lainnya	2,972,643,997	2,972,643,997	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(77,647,443,838)	(57,213,958,046)	(20,433,485,792)	35.71
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>1,341,084,676,219</b>	<b>1,229,538,844,749</b>	<b>111,545,831,470</b>	<b>9.07</b>
<b>ASET LAINNYA</b>				
Aset Tak Berwujud	1,835,302,990	831,576,690	1,003,726,300	120.70
Aset Lain-lain	7,090,315,928	11,500,405,790	(4,410,089,862)	(38.35)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(7,704,177,285)	(11,871,882,975)	4,167,705,690	(35.11)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>1,221,441,633</b>	<b>460,099,505</b>	<b>761,342,128</b>	<b>165.47</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>1,343,097,260,592</b>	<b>1,231,001,711,615</b>	<b>112,095,548,977</b>	<b>9.11</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	0	6,946,200	(6,946,200)	(100.00)
Pendapatan Diterima Dimuka	105,678,225	0	105,678,225	0.00
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>105,678,225</b>	<b>6,946,200</b>	<b>98,732,025</b>	<b>1,421.38</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>105,678,225</b>	<b>6,946,200</b>	<b>98,732,025</b>	<b>1,421.38</b>
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	1,342,991,582,367	1,230,994,765,415	111,996,816,952	9.10
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>1,342,991,582,367</b>	<b>1,230,994,765,415</b>	<b>111,996,816,952</b>	<b>9.10</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>1,342,991,582,367</b>	<b>1,230,994,765,415</b>	<b>111,996,816,952</b>	<b>9.10</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>1,343,097,260,592</b>	<b>1,231,001,711,615</b>	<b>112,095,548,977</b>	<b>9.11</b>

**NERACA PERCOBAAN  
TINGKAT ESELON I  
PER DESEMBER 2020  
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013  
UNIT ORGANISASI : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

Tgl. Cetak 03/03/2021 12:54 PM  
lap\_neraca\_percobaan\_kas\_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115612	Piutang dari KPPN	5,769,982,984	0
0.0	219711	Utang Kepada KUN	686,445,852	0
2.0	425131	Estimasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan Yang Dialokasikan	30,000,000	0
2.0	425421	Estimasi Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan Yang Dialokasikan	819,625,000	0
2.0	511111	Allotment Belanja Gaji Pokok PNS	0	20,368,057,000
2.0	511119	Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	337,000
2.0	511121	Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	1,356,527,000
2.0	511122	Allotment Belanja Tunj. Anak PNS	0	358,709,000
2.0	511123	Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS	0	948,280,000
2.0	511124	Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	1,523,885,000
2.0	511125	Allotment Belanja Tunj. PPh PNS	0	108,299,000
2.0	511126	Allotment Belanja Tunj. Beras PNS	0	944,398,000
2.0	511129	Allotment Belanja Uang Makan PNS	0	3,571,176,000
2.0	511151	Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS	0	583,172,000
2.0	511192	Allotment Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS TNI/POLRI	0	10,000,000
2.0	512211	Allotment Belanja Uang Lembur	0	557,406,000
2.0	521111	Allotment Belanja Keperluan Perkantoran	0	9,533,846,000
2.0	521113	Allotment Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	0
2.0	521114	Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	37,656,000
2.0	521115	Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	999,861,000
2.0	521119	Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya	0	1,897,552,000
2.0	521131	Allotment Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	4,547,890,000
2.0	521211	Allotment Belanja Bahan	0	12,658,030,000
2.0	521213	Allotment Belanja Honor Output Kegiatan	0	2,003,370,000
2.0	521219	Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	18,138,437,000
2.0	521241	Allotment Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	1,297,905,000
2.0	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	712,603,000
2.0	521813	Allotment Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	0	0
2.0	521832	Allotment Belanja Barang Persediaan Lainnya	0	5,672,000
2.0	521841	Allotment Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	14,000,000
2.0	522111	Allotment Belanja Langganan Listrik	0	1,685,492,000
2.0	522112	Allotment Belanja Langganan Telepon	0	51,405,000
2.0	522113	Allotment Belanja Langganan Air	0	2,400,000
2.0	522119	Allotment Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	1,531,036,000
2.0	522141	Allotment Belanja Sewa	0	4,210,854,000
2.0	522151	Allotment Belanja Jasa Profesi	0	11,351,176,000
2.0	522191	Allotment Belanja Jasa Lainnya	0	785,154,000
2.0	522192	Allotment Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	73,550,000
2.0	523111	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	8,821,718,000

**NERACA PERCOBAAN  
TINGKAT ESELON I  
PER DESEMBER 2020  
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013  
UNIT ORGANISASI : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

Tgl. Cetak 03/03/2021 12:54 PM  
lap\_neraca\_percobaan\_kas\_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
2.0	523112	Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	1,331,475,000
2.0	523114	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	50,000,000
2.0	523121	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	2,568,396,000
2.0	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa	0	8,354,143,000
2.0	524113	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	828,060,000
2.0	524114	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	634,427,000
2.0	524119	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	1,330,870,000
2.0	531112	Allotment Belanja Modal Pembebasan Tanah	0	220,737,000
2.0	531115	Allotment Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	375,785,000
2.0	532111	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	22,098,621,000
2.0	532119	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	0	115,970,000
2.0	533111	Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	84,032,760,000
2.0	533115	Allotment Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	0
2.0	533121	Allotment Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	0
2.0	534131	Allotment Belanja Modal Jaringan	0	52,027,000
2.0	534161	Allotment Belanja Penambahan Nilai Jaringan	0	0
2.0	536111	Allotment Belanja Modal Lainnya	0	1,196,387,000
2.0	536113	Allotment Belanja Modal Sewa Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	0	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	51,299,000
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	179,260,121
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	196,884,187
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	987,500,000
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	9,485,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	463,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	911,619
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	110,267,881
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	44
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	20,207,200,040	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	300,818	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	1,488
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1,347,031,026	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	355,497,108	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	941,300,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,512,700,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	105,902,039	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	921,107,740	0
3.1	511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	0	50,400
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	3,461,968,000	0
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	667,850

**NERACA PERCOBAAN  
TINGKAT ESELON I  
PER DESEMBER 2020  
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013  
UNIT ORGANISASI : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

Tgl. Cetak 03/03/2021 12:54 PM  
lap\_neraca\_percobaan\_kas\_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	566,330,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	1,110,000
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	553,107,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	9,490,689,487	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	22,508,370	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	969,594,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,865,386,455	0
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	4,243,152,070	0
3.0	521211	Belanja Bahan	11,577,376,159	0
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	75,000
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,756,900,000	0
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	680,000
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	17,866,226,980	0
3.0	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,067,501,225	0
3.1	521241	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	1,050,000
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	699,830,990	0
3.0	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	5,660,000	0
3.0	521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	14,000,000	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	1,662,988,701	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	35,641,459	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	1,420,450	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,426,914,416	0
3.0	522141	Belanja Sewa	3,761,037,443	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	10,699,805,000	0
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	117,136,500
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	667,240,000	0
3.0	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	60,595,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8,815,598,108	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,285,837,783	0
3.0	523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	49,275,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,433,880,432	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	8,015,967,847	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	144,832,991
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	714,569,000	0
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	8,585,000
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	568,504,500	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,225,740,970	0
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	25,856,481
3.0	531112	Belanja Modal Pembebasan Tanah	210,295,800	0
3.0	531115	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	335,504,200	0

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT ESELON I**  
**PER DESEMBER 2020**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013  
UNIT ORGANISASI : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

Tgl. Cetak 03/03/2021 12:54 PM  
lap\_neraca\_percobaan\_kas\_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21,681,561,148	0
3.0	532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	114,970,000	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	83,925,521,608	0
3.0	534131	Belanja Modal Jaringan	49,000,000	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	1,116,435,354	0
JUMLAH			<b>235,715,627,562</b>	<b>235,715,627,562</b>

**NERACA PERCOBAAN  
TINGKAT ESELON I  
PER DESEMBER 2020  
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013  
UNIT ORGANISASI : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Tgl. Cetak 03/03/2021 12:51 AM  
lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	0	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	55,000,000	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB	0	275,000
0.0	117111	Barang Konsumsi	567,752,386	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	168,665,354	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	0	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	0
0.0	131111	Tanah	1,089,000,068,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	77,320,563,531	0
0.0	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	0	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	239,994,199,536	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	7,384,906,693	0
0.0	134112	Irigasi	831,972,000	0
0.0	134113	Jaringan	1,227,766,300	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	0	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	2,972,643,997	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	48,974,750,936
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	24,084,255,001
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	2,125,443,723
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	69,331,003
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	856,163,175
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	1,537,500,000
0.0	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	0	0
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	0
0.0	162151	Software	1,835,302,990	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	7,090,315,928	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	6,780,509,807
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	923,667,478
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	0
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	105,678,225
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	0
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	228,109,528,016
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,536,070,852	0
0.0	313211	Transfer Keluar	114,194,054	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	26,126,709,747
0.0	391111	Ekuitas	0	1,230,994,765,415

**NERACA PERCOBAAN  
TINGKAT ESELON I  
PER DESEMBER 2020  
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013  
UNIT ORGANISASI : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Tgl. Cetak 03/03/2021 12:51 AM  
lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	391114	Revaluasi Aset Tetap	0	529,978,604
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	5,758,110,001	0
0.0	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	50,593,500	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	51,299,000
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	179,260,121
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	91,205,962
3.0	425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	987,500,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	463,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	911,619
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	110,267,881
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	44
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	431,644,229
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	20,207,200,040	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	300,818	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	1,488
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	1,347,031,026	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	355,497,108	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	941,300,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,512,700,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	105,902,039	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	921,107,740	0
3.1	511126	Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS	0	50,400
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	3,455,021,800	0
3.1	511129	Pengembalian Beban Uang Makan PNS	0	667,850
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	566,330,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	1,110,000
3.0	512211	Beban Uang Lembur	553,107,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	9,490,689,487	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	22,508,370	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	969,594,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	1,865,386,455	0
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	4,243,152,070	0
3.0	521211	Beban Bahan	11,577,376,159	0
3.1	521211	Pengembalian Beban Bahan	0	75,000
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	1,756,900,000	0
3.1	521213	Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	0	680,000
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	17,866,226,980	0
3.0	521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,064,301,225	0
3.1	521241	Pengembalian Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	1,050,000

**NERACA PERCOBAAN  
TINGKAT ESELON I  
PER DESEMBER 2020  
(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013  
UNIT ORGANISASI : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Tgl. Cetak 03/03/2021 12:51 AM  
lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	1,662,988,701	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	35,641,459	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	1,420,450	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,426,914,416	0
3.0	522141	Beban Sewa	3,761,037,443	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	10,699,805,000	0
3.1	522151	Pengembalian Beban Jasa Profesi	0	117,136,500
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	667,240,000	0
3.0	522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	60,595,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8,815,598,108	0
3.0	523114	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	49,275,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,433,880,432	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	8,015,967,847	0
3.1	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	144,832,991
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	714,569,000	0
3.1	524113	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	8,585,000
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	568,504,500	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1,225,740,970	0
3.1	524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	25,856,481
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	7,692,460,149	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	6,454,644,867	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	851,266,737	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	19,808,858	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	10,768,750	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	166,497,038	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	25,293,634	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	1,909,346,742	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	728,055,445	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	70,787,936	0
3.0	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	47,425
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	573,335,200	0
<b>JUMLAH</b>			<b>1,573,371,201,121</b>	<b>1,573,371,201,121</b>

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT ESELON I**  
**PER 1 JANUARI 2020 (SALDO AWAL)**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013  
 UNIT ORGANISASI : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI

Tgl. Cetak 03/03/2021

lap\_neraca\_percobaan\_sawal\_akrual\_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	55,000,000	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	0	275,000
0.0	117111	Barang Konsumsi	832,720,203	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	94,214,700	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	21,107,458	0
0.0	131111	Tanah	1,072,226,368,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	52,360,266,470	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	149,797,879,335	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	7,384,906,693	0
0.0	134112	Irigasi	831,972,000	0
0.0	134113	Jaringan	1,178,766,300	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	0	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	2,972,643,997	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	39,301,903,059
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	14,205,461,431
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	1,274,176,986
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	49,522,145
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	845,394,425
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	1,537,500,000
0.0	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	0	0
0.0	162151	Software	780,983,190	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	50,593,500	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	11,500,405,790	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	11,165,306,035
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	706,576,940
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	6,946,200
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	0
0.0	391111	Ekuitas	0	1,230,994,765,415
<b>JUMLAH</b>			<b>1,300,087,827,636</b>	<b>1,300,087,827,636</b>

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
**(DALAM RUPIAH)**

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 ESELON I : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LRA.F.W.1  
 Tanggal : 03/03/21 12:54 PM  
 Halaman : 1  
 Prg ID : lap\_ira\_face\_es1\_komparatif--

NO	URAIAN	2020				2019			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	849,625,000	1,536,070,852	(686,445,852)	181	2,479,000,000	3,436,255,357	(957,255,357)	139
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH</b>	<b>849,625,000</b>	<b>1,536,070,852</b>	<b>(686,445,852)</b>	<b>181</b>	<b>2,479,000,000</b>	<b>3,436,255,357</b>	<b>(957,255,357)</b>	<b>139</b>
<b>B</b>	<b>BELANJA</b>				0				0
	BELANJA PEGAWAI	30,330,246,000	29,970,614,033	359,631,967	99	28,508,607,000	28,368,995,821	139,611,179	100
	BELANJA BARANG	95,456,978,000	90,705,625,873	4,751,352,127	95	121,643,789,000	112,969,916,834	8,673,872,166	93
	BELANJA MODAL	108,092,287,000	107,433,288,110	658,998,890	99	1,524,721,000	1,522,018,000	2,703,000	100
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>JUMLAH BELANJA (B I + B II)</b>	<b>233,879,511,000</b>	<b>228,109,528,016</b>	<b>5,769,982,984</b>	<b>98</b>	<b>151,677,117,000</b>	<b>142,860,930,655</b>	<b>8,816,186,345</b>	<b>94</b>
<b>C</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				0				0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
TINGKAT ESELON I  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020  
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013  
ESELON I : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LRA.P.E1.1  
Tanggal : 03/03/21 12:53  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_pen\_akun\_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	51,299,000	0	51,299,000	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	179,260,121	0	179,260,121	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	30,000,000	196,884,187	0	196,884,187	656.28
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	30,000,000	427,443,308	0	427,443,308	1,424.81
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi					
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	819,625,000	987,500,000	0	987,500,000	120.48
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4254	819,625,000	987,500,000	0	987,500,000	120.48
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan					
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	0	9,485,000	0	9,485,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	0	9,485,000	0	9,485,000	
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	463,000	0	463,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	463,000	0	463,000	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	911,619	0	911,619	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	110,267,881	0	110,267,881	0
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	44	0	44	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	111,179,544	0	111,179,544	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	849,625,000	1,536,070,852	0	1,536,070,852	180.79
	JUMLAH PENDAPATAN	849,625,000	1,536,070,852	0	1,536,070,852	180.79

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN  
TINGKAT ESELON I  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013  
ESELON I : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LRA.B.S.  
Tanggal : 03/03/21 12:53  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_es1 --

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	5,725,576,000	20,368,057,000	20,207,200,040	0	20,207,200,040	99.21	160,856,960
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	145,000	337,000	300,818	1,488	299,330	88.82	37,670
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	363,203,000	1,356,527,000	1,347,031,026	0	1,347,031,026	99.3	9,495,974
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	105,785,000	358,709,000	355,497,108	0	355,497,108	99.1	3,211,892
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	189,301,000	948,280,000	941,300,000	0	941,300,000	99.26	6,980,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	443,580,000	1,523,885,000	1,512,700,000	0	1,512,700,000	99.27	11,185,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	52,420,000	108,299,000	105,902,039	0	105,902,039	97.79	2,396,961
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	340,655,000	944,398,000	921,107,740	50,400	921,057,340	97.53	23,340,660
511129	Belanja Uang Makan PNS	1,712,388,000	3,571,176,000	3,461,968,000	667,850	3,461,300,150	96.92	109,875,850
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	390,812,000	583,172,000	566,330,000	1,110,000	565,220,000	96.92	17,952,000
511192	Belanja Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	9,323,865,000	29,772,840,000	29,419,336,771	1,829,738	29,417,507,033	98.81	355,332,967
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	0	557,406,000	553,107,000	0	553,107,000	99.23	4,299,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	0	557,406,000	553,107,000	0	553,107,000	99.23	4,299,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	9,323,865,000	30,330,246,000	29,972,443,771	1,829,738	29,970,614,033	98.82	359631967
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2,327,917,000	9,533,846,000	9,490,689,487	0	9,490,689,487	99.55	43,156,513
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	18,996,000	37,656,000	22,508,370	0	22,508,370	59.77	15,147,630
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	625,680,000	999,861,000	969,594,000	0	969,594,000	96.97	30,267,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	311,156,000	1,897,552,000	1,865,386,455	0	1,865,386,455	98.3	32,165,545
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi	0	4,547,890,000	4,243,152,070	0	4,243,152,070	93.3	304,737,930
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	3,283,749,000	17,016,805,000	16,591,330,382	0	16,591,330,382	97.5	425,474,618
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	21,893,402,000	12,658,030,000	11,577,376,159	75,000	11,577,301,159	91.46	1,080,728,841
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	523,165,000	2,003,370,000	1,756,900,000	680,000	1,756,220,000	87.66	247,150,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	18,759,355,000	18,138,437,000	17,866,226,980	0	17,866,226,980	98.5	272,210,020
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	0	1,297,905,000	1,067,501,225	1,050,000	1,066,451,225	82.17	231,453,775
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	41,175,922,000	34,097,742,000	32,268,004,364	1,805,000	32,266,199,364	94.63	1,831,542,636
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	214,254,000	712,603,000	699,830,990	0	699,830,990	98.21	12,772,010
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	0	5,672,000	5,660,000	0	5,660,000	99.79	12,000
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi	0	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000	100	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN  
TINGKAT ESELON I  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013  
ESELON I : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LRA.B.S.  
Tanggal : 03/03/21 12:53  
Halaman : 2  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_es1 --

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218</b>	<b>214,254,000</b>	<b>732,275,000</b>	<b>719,490,990</b>	<b>0</b>	<b>719,490,990</b>	<b>98.25</b>	<b>12,784,010</b>
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	108,660,000	1,685,492,000	1,662,988,701	0	1,662,988,701	98.66	22,503,299
522112	Belanja Langganan Telepon	29,400,000	51,405,000	35,641,459	0	35,641,459	69.33	15,763,541
522113	Belanja Langganan Air	7,200,000	2,400,000	1,420,450	0	1,420,450	59.19	979,550
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	227,274,000	1,531,036,000	1,426,914,416	0	1,426,914,416	93.2	104,121,584
522141	Belanja Sewa	3,668,960,000	4,210,854,000	3,761,037,443	0	3,761,037,443	89.32	449,816,557
522151	Belanja Jasa Profesi	8,126,980,000	11,351,176,000	10,699,805,000	117,136,500	10,582,668,500	93.23	768,507,500
522191	Belanja Jasa Lainnya	321,414,000	785,154,000	667,240,000	0	667,240,000	84.98	117,914,000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	73,550,000	60,595,000	0	60,595,000	82.39	12,955,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221</b>	<b>12,489,888,000</b>	<b>19,691,067,000</b>	<b>18,315,642,469</b>	<b>117,136,500</b>	<b>18,198,505,969</b>	<b>93.01</b>	<b>1,492,561,031</b>
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	89,800,000	8,821,718,000	8,815,598,108	0	8,815,598,108	99.93	6,119,892
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	18,000,000	1,331,475,000	1,285,837,783	0	1,285,837,783	96.57	45,637,217
523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -	0	50,000,000	49,275,000	0	49,275,000	98.55	725,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	991,856,000	2,568,396,000	2,433,880,432	0	2,433,880,432	94.76	134,515,568
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231</b>	<b>1,099,656,000</b>	<b>12,771,589,000</b>	<b>12,584,591,323</b>	<b>0</b>	<b>12,584,591,323</b>	<b>98.54</b>	<b>186,997,677</b>
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	6,778,317,000	8,354,143,000	8,015,967,847	144,832,991	7,871,134,856	94.22	483,008,144
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	177,450,000	828,060,000	714,569,000	8,585,000	705,984,000	85.26	122,076,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	161,500,000	634,427,000	568,504,500	0	568,504,500	89.61	65,922,500
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	1,330,870,000	1,225,740,970	25,856,481	1,199,884,489	90.16	130,985,511
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241</b>	<b>7,117,267,000</b>	<b>11,147,500,000</b>	<b>10,524,782,317</b>	<b>179,274,472</b>	<b>10,345,507,845</b>	<b>94.41</b>	<b>801,992,155</b>
	<b>JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52</b>	<b>65,380,736,000</b>	<b>95,456,978,000</b>	<b>91,003,841,845</b>	<b>298,215,972</b>	<b>90,705,625,873</b>	<b>95.33</b>	<b>475,135,2127</b>
53	BELANJA MODAL							
5311	Belanja Modal Tanah							
531112	Belanja Modal Pembebasan Tanah	0	220,737,000	210,295,800	0	210,295,800	95.27	10,441,200
531115	Belanja Modal Pengurusan dan Pematangan Tanah	641,750,000	375,785,000	335,504,200	0	335,504,200	89.28	40,280,800
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5311</b>	<b>641,750,000</b>	<b>596,522,000</b>	<b>545,800,000</b>	<b>0</b>	<b>545,800,000</b>	<b>91.5</b>	<b>50,722,000</b>
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2,471,609,000	22,098,621,000	21,681,561,148	0	21,681,561,148	98.11	417,059,852
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan	0	115,970,000	114,970,000	0	114,970,000	99.14	1,000,000
	<b>JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321</b>	<b>2,471,609,000</b>	<b>22,214,591,000</b>	<b>21,796,531,148</b>	<b>0</b>	<b>21,796,531,148</b>	<b>98.12</b>	<b>418,059,852</b>
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47,062,475,000	84,032,760,000	83,925,521,608	0	83,925,521,608	99.87	107,238,392

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA  
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN  
TINGKAT ESELON I  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013  
ESELON I : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LRA.B.S.  
Tanggal : 03/03/21 12:53  
Halaman : 3  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_es1 --

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung	292,634,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	47,355,109,000	84,032,760,000	83,925,521,608	0	83,925,521,608	99.87	107,238,392
5341	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan							
534131	Belanja Modal Jaringan	0	52,027,000	49,000,000	0	49,000,000	94.18	3,027,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5341	0	52,027,000	49,000,000	0	49,000,000	94.18	3,027,000
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	0	1,196,387,000	1,116,435,354	0	1,116,435,354	93.32	79,951,646
536113	Belanja Modal Sewa Aset Tetap Lainnya/Aset Lainnya	220,737,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	220,737,000	1,196,387,000	1,116,435,354	0	1,116,435,354	93.32	79,951,646
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	50,689,205,000	108,092,287,000	107,433,288,110	0	107,433,288,110	99.39	658998890
	JUMLAH BELANJA	125,393,806,000	233,879,511,000	228,409,573,726	300,045,710	228,109,528,016	97.66	5,769,982,984

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19  
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN  
TINGKAT ESELON I  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013  
ESELON I : 12

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LRA.B.S.2  
Tanggal : 03/03/21 12:55  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_bel\_akun\_covid\_es1 --

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	4,547,890,000	4,243,152,070	0	4,243,152,070	93.3	304,737,930
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	0	4,547,890,000	4,243,152,070	0	4,243,152,070	93.3	304,737,930
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	1,297,905,000	1,067,501,225	1,050,000	1,066,451,225	82.17	231,453,775
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	0	1,297,905,000	1,067,501,225	1,050,000	1,066,451,225	82.25	231,453,775
5218	Belanja Barang Persediaan							
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	0	14,000,000	14,000,000	0	14,000,000	100	0
5221	Belanja Jasa							
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	73,550,000	60,595,000	0	60,595,000	82.39	12,955,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	0	73,550,000	60,595,000	0	60,595,000	82.39	12,955,000
5231	Belanja Pemeliharaan							
523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi COVID-19	0	50,000,000	49,275,000	0	49,275,000	98.55	725,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	0	50,000,000	49,275,000	0	49,275,000	98.55	725,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	0	5,983,345,000	5,434,523,295	1,050,000	5,433,473,295	90.83	549871705
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	0	115,970,000	114,970,000	0	114,970,000	99.14	1,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	0	115,970,000	114,970,000	0	114,970,000	99.14	1,000,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	0	115,970,000	114,970,000	0	114,970,000	99.14	1000000
	JUMLAH BELANJA	0	6,099,315,000	5,549,493,295	1,050,000	5,548,443,295	90.99	550,871,705

LAPORAN OPERASIONAL  
TINGKAT ESELON I  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019  
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN  
ESELON I

: 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
: 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LO.ES1  
Tanggal : 03/03/21 12:54  
Halaman : 1  
Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM  
Prog ID : lap\_lo\_es1 --

URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,079,169,006	3,431,479,560	(2,352,310,554)	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1,079,169,006	3,431,479,560	(2,352,310,554)	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	1,079,169,006	3,431,479,560	(2,352,310,554)	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	29,963,667,833	28,375,942,021	1,587,725,812	-
Beban Persediaan	1,909,346,742	2,418,252,592	(508,905,850)	-
Beban Barang dan Jasa	67,626,170,915	76,644,835,836	(9,018,664,921)	-
Beban Pemeliharaan	12,026,808,985	3,057,912,251	8,968,896,734	-
Beban Perjalanan Dinas	10,345,507,845	30,387,685,862	(20,042,178,017)	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	-
Beban Bunga	0	0	0	-
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT ESELON I**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN  
ESELON I

: 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
: 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : LO.ES1  
Tanggal : 03/03/21 12:54  
Halaman : 2  
Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM  
Prog ID : lap\_lo\_es1 --

URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	15,220,740,033	11,481,410,054	3,739,329,979	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(47,425)	0	(47,425)	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>137,092,194,928</b>	<b>152,366,038,616</b>	<b>(15,273,843,688)</b>	-
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>(136,013,025,922)</b>	<b>(148,934,559,056)</b>	<b>12,921,533,134</b>	-
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	230,559,121	(49,083,120,100)	49,313,679,221	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	230,559,121	0	230,559,121	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	49,083,120,100	(49,083,120,100)	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	472,035,793	178,559,806	293,475,987	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	542,823,729	685,418,537	(142,594,808)	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	70,787,936	506,858,731	(436,070,795)	-
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>702,594,914</b>	<b>(48,904,560,294)</b>	<b>49,607,155,208</b>	-
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>(135,310,431,008)</b>	<b>(197,839,119,350)</b>	<b>62,528,688,342</b>	-
<b>POS LUAR BIASA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
<b>POS LUAR BIASA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>(135,310,431,008)</b>	<b>(197,839,119,350)</b>	<b>62,528,688,342</b>	-

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
TINGKAT ESELON I  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN TAHUN 2019  
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MAN  
ESELON I : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Kode Lap : Lpe.es1  
Tanggal : 03/03/2021 12:52  
Halaman : 1  
Prj ID : lap\_lpe\_es1

URAIAN	2020	2019	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	1,230,994,765,415	961,490,164,380	269,504,601,035	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(135,310,431,008)	(197,839,119,350)	62,528,688,342	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(5,278,724,897)	(3,643,611,407)	(1,635,113,490)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	(50,593,500)	0	(50,593,500)	-
SELISIH REVALUASI ASET	529,978,604	(57,849,464,125)	58,379,442,729	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(5,758,110,001)	54,205,852,718	(59,963,962,719)	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	252,585,972,857	470,987,331,792	(218,401,358,935)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	111,996,816,952	269,504,601,035	(157,507,784,083)	-
EKUITAS AKHIR	1,342,991,582,367	1,230,994,765,415	111,996,816,952	-

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA  
 POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2020  
 TAHUN ANGGARAN 2020

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 UAPPB- : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI  
 MANUSIA

Tanggal : 03/03/21 12:53 AM  
 Halaman : 1  
 Kode Lap : lap\_bmn\_neraca\_face\_es

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	567,752,386
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	168,665,354
131111	Tanah	1,089,000,068,000
132111	Peralatan dan Mesin	77,320,563,531
133111	Gedung dan Bangunan	239,994,199,536
134111	Jalan dan Jembatan	7,384,906,693
134112	Irigasi	831,972,000
134113	Jaringan	1,227,766,300
135121	Aset Tetap Lainnya	2,972,643,997
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(48,974,750,936)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(24,084,255,001)
137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(2,125,443,723)
137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	(69,331,003)
137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	(856,163,175)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(1,537,500,000)
162151	Software	1,835,302,990
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	7,090,315,928
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(6,780,509,807)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(923,667,478)
<b>J U M L A H</b>		<b>1,343,042,535,592</b>

LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN  
INTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
UAPPB-E1 : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tanggal : 03/03/21 12:54 AM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_bmn\_intra\_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2020		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2020	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131111	Tanah	160,933	1,072,226,368,000	40,000	16,773,700,000	0	0	200,933	1,089,000,068,000
20101	TANAH PERSIL	160,933	1,072,226,368,000	40,000	16,773,700,000	0	0	200,933	1,089,000,068,000
132111	Peralatan dan Mesin	8,559	52,360,266,470	3,184	25,506,147,006	54	545,849,945	11,689	77,320,563,531
30101	ALAT BESAR DARAT	1	63,500,000	0	0	0	0	1	63,500,000
30103	ALAT BANTU	27	209,029,220	8	589,486,400	0	0	35	798,515,620
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	56	7,597,427,500	12	1,512,050,000	0	0	68	9,109,477,500
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2	5,800,000	10	34,573,000	0	0	12	40,373,000
30204	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	2	54,450,000	0	0	0	0	2	54,450,000
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	6	58,000,000	17	24,825,000	0	0	23	82,825,000
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	0	0	2	2,300,000	0	0	2	2,300,000
30303	ALAT UKUR	0	0	2	53,677,000	0	0	2	53,677,000
30401	ALAT PENGOLAHAN	1	15,410,000	8	18,673,005	0	0	9	34,083,005
30501	ALAT KANTOR	1,024	5,199,355,386	407	3,868,138,934	5	16,745,000	1,426	9,050,749,320
30502	ALAT RUMAH TANGGA	5,579	16,767,333,555	2,004	10,931,851,811	25	250,672,351	7,558	27,448,513,015
30601	ALAT STUDIO	171	5,678,779,660	91	1,759,055,934	0	0	262	7,437,835,594
30602	ALAT KOMUNIKASI	163	1,176,895,685	17	96,963,240	0	0	180	1,273,858,925
30603	PERALATAN PEMANCAR	22	230,168,800	1	10,868,000	0	0	23	241,036,800
30701	ALAT KEDOKTERAN	333	895,905,000	18	81,888,500	1	1,650,000	350	976,143,500
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	1	12,306,000	0	0	0	0	1	12,306,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	39	515,232,500	4	171,567,000	0	0	43	686,799,500
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	4	4,725,000	0	0	0	0	4	4,725,000
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	51	546,704,700	0	0	0	0	51	546,704,700
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	3	473,597,400	0	0	0	0	3	473,597,400
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	20	200,649,500	0	0	0	0	20	200,649,500
31001	KOMPUTER UNIT	648	9,280,049,929	375	5,093,864,244	23	276,782,594	1,000	14,097,131,579
31002	PERALATAN KOMPUTER	347	2,583,969,635	204	1,222,239,538	0	0	551	3,806,209,173
31301	SUMUR	8	117,197,000	0	0	0	0	8	117,197,000
31503	ALAT SAR	2	13,200,000	1	8,200,000	0	0	3	21,400,000
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	9	239,132,000	0	0	0	0	9	239,132,000
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	7	210,264,000	0	0	0	0	7	210,264,000
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	1	36,750,000	1	10,000,000	0	0	2	46,750,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	32	174,434,000	2	15,925,400	0	0	34	190,359,400
133111	Gedung dan Bangunan	55	149,797,879,335	12	104,648,087,181	1	14,451,766,980	66	239,994,199,536
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	28	93,939,929,927	10	88,137,209,501	1	14,451,766,980	37	167,625,372,448
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	25	54,029,736,510	1	10,632,877,251	0	0	26	64,662,613,761
40401	TUGUTANDA BATAS	2	1,828,212,898	1	5,878,000,429	0	0	3	7,706,213,327

LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN  
INTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
UAPPB-E1 : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tanggal : 03/03/21 12:54 AM  
Halaman : 2  
Kode Lap : lap\_bmn\_intra\_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2020		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2020	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134111	Jalan dan Jembatan	15,687	7,384,906,693	0	0	0	0	15,687	7,384,906,693
50101	JALAN	15,687	7,384,906,693	0	0	0	0	15,687	7,384,906,693
134112	Irigasi	1	831,972,000	0	0	0	0	1	831,972,000
50202	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	1	831,972,000	0	0	0	0	1	831,972,000
134113	Jaringan	5	1,178,766,300	1	49,000,000	0	0	6	1,227,766,300
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	2	406,250,000	0	0	0	0	2	406,250,000
50310	INSTALASI LAIN	3	772,516,300	0	0	0	0	3	772,516,300
50402	JARINGAN LISTRIK	0	0	1	49,000,000	0	0	1	49,000,000
135111	Aset Tetap Renovasi	0	0	1	112,709,054	1	112,709,054	0	0
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	0	0	1	112,709,054	1	112,709,054	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	9,043	2,972,643,997	0	0	0	0	9,043	2,972,643,997
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	8,706	1,381,923,997	0	0	0	0	8,706	1,381,923,997
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	1	48,220,000	0	0	0	0	1	48,220,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	335	1,537,500,000	0	0	0	0	335	1,537,500,000
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	1	5,000,000	0	0	0	0	1	5,000,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	1,717	11,500,405,790	1	4,981,666	313	4,415,071,528	1,405	7,090,315,928
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	21	2,497,843,646	0	0	0	0	21	2,497,843,646
30401	ALAT PENGOLAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	334	2,939,343,682	0	0	30	928,714,400	304	2,010,629,282
30502	ALAT RUMAH TANGGA	1,071	2,130,857,878	1	4,981,666	222	1,717,608,578	850	418,230,966
30601	ALAT STUDIO	11	12,957,650	0	0	2	2,000,000	9	10,957,650
30602	ALAT KOMUNIKASI	12	36,818,500	0	0	0	0	12	36,818,500
30603	PERALATAN PEMANCAR	0	0	0	0	0	0	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	2	162,000	0	0	0	0	2	162,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	1	104,263,500	0	0	1	104,263,500	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	172	2,495,178,824	0	0	57	1,394,360,050	115	1,100,818,774
31002	PERALATAN KOMPUTER	20	278,628,882	0	0	1	268,125,000	19	10,503,882
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	1	18,635,000	0	0	0	0	1	18,635,000
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	2	531,865,216	0	0	0	0	2	531,865,216
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	0	0	0	0	0	0	0	0
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	70	453,851,012	0	0	0	0	70	453,851,012
<b>TOTAL</b>			1,298,253,208,585		147,094,624,907		19,525,397,507		1,425,822,435,985

LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
UAPPB-E1 : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tanggal : 03/03/21 12:57 PM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_bmn\_gab\_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2020		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2020	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131111	Tanah	160,933	1,072,226,368,000	40,000	16,773,700,000	0	0	200,933	1,089,000,068,000
20101	TANAH PERSIL	160,933	1,072,226,368,000	40,000	16,773,700,000	0	0	200,933	1,089,000,068,000
132111	Peralatan dan Mesin	11,635	53,163,272,059	4,202	26,117,998,606	60	549,093,245	15,777	78,732,177,420
30101	ALAT BESAR DARAT	1	63,500,000	0	0	0	0	1	63,500,000
30103	ALAT BANTU	27	209,029,220	8	589,486,400	0	0	35	798,515,620
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	56	7,597,427,500	12	1,512,050,000	0	0	68	9,109,477,500
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2	5,800,000	10	34,573,000	0	0	12	40,373,000
30204	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	2	54,450,000	0	0	0	0	2	54,450,000
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	6	58,000,000	17	24,825,000	0	0	23	82,825,000
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	1	125,000	2	2,300,000	0	0	3	2,425,000
30303	ALAT UKUR	0	0	2	53,677,000	0	0	2	53,677,000
30401	ALAT PENGOLAHAN	1	15,410,000	9	19,373,005	0	0	10	34,783,005
30501	ALAT KANTOR	1,775	5,322,817,136	408	3,869,038,934	5	16,745,000	2,178	9,175,111,070
30502	ALAT RUMAH TANGGA	7,776	17,411,985,646	2,924	11,479,215,611	31	253,915,651	10,669	28,637,285,606
30601	ALAT STUDIO	183	5,680,893,908	128	1,791,935,934	0	0	311	7,472,829,842
30602	ALAT KOMUNIKASI	165	1,177,195,685	50	110,425,740	0	0	215	1,287,621,425
30603	PERALATAN PEMANCAR	22	230,168,800	1	10,868,000	0	0	23	241,036,800
30701	ALAT KEDOKTERAN	355	909,987,500	18	81,888,500	1	1,650,000	372	990,226,000
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	1	12,306,000	2	200,000	0	0	3	12,506,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	39	515,232,500	4	171,567,000	0	0	43	686,799,500
30802	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	4	4,725,000	0	0	0	0	4	4,725,000
30803	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	51	546,704,700	0	0	0	0	51	546,704,700
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	3	473,597,400	0	0	0	0	3	473,597,400
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	20	200,649,500	0	0	0	0	20	200,649,500
31001	KOMPUTER UNIT	648	9,280,049,929	375	5,093,864,244	23	276,782,594	1,000	14,097,131,579
31002	PERALATAN KOMPUTER	347	2,583,969,635	228	1,238,584,838	0	0	575	3,822,554,473
31301	SUMUR	8	117,197,000	0	0	0	0	8	117,197,000
31503	ALAT SAR	2	13,200,000	1	8,200,000	0	0	3	21,400,000
31504	ALAT KERJA PENERBANGAN	9	239,132,000	0	0	0	0	9	239,132,000
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	7	210,264,000	0	0	0	0	7	210,264,000
31801	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	81	52,670,000	1	10,000,000	0	0	82	62,670,000
31901	PERALATAN OLAH RAGA	43	176,784,000	2	15,925,400	0	0	45	192,709,400
133111	Gedung dan Bangunan	55	149,797,879,335	12	104,648,087,181	1	14,451,766,980	66	239,994,199,536
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	28	93,939,929,927	10	88,137,209,501	1	14,451,766,980	37	167,625,372,448
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	25	54,029,736,510	1	10,632,877,251	0	0	26	64,662,613,761
40401	TUGU/TANDA BATAS	2	1,828,212,898	1	5,878,000,429	0	0	3	7,706,213,327

LAPORAN BARANG PENGGUNA TAHUNAN  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
UAPPB-E1 : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tanggal : 03/03/21 12:57 PM  
Halaman : 2  
Kode Lap : lap\_bmn\_gab\_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2020		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2020	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134111	Jalan dan Jembatan	15,687	7,384,906,693	0	0	0	0	15,687	7,384,906,693
50101	JALAN	15,687	7,384,906,693	0	0	0	0	15,687	7,384,906,693
134112	Irigasi	1	831,972,000	0	0	0	0	1	831,972,000
50202	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	1	831,972,000	0	0	0	0	1	831,972,000
134113	Jaringan	5	1,178,766,300	1	49,000,000	0	0	6	1,227,766,300
50306	INSTALASI GARDU LISTRIK	2	406,250,000	0	0	0	0	2	406,250,000
50310	INSTALASI LAIN	3	772,516,300	0	0	0	0	3	772,516,300
50402	JARINGAN LISTRIK	0	0	1	49,000,000	0	0	1	49,000,000
135111	Aset Tetap Renovasi	0	0	1	112,709,054	1	112,709,054	0	0
60703	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	0	0	1	112,709,054	1	112,709,054	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	9,043	2,972,643,997	0	0	0	0	9,043	2,972,643,997
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	8,706	1,381,923,997	0	0	0	0	8,706	1,381,923,997
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	1	48,220,000	0	0	0	0	1	48,220,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	335	1,537,500,000	0	0	0	0	335	1,537,500,000
60202	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	1	5,000,000	0	0	0	0	1	5,000,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	1,728	11,500,630,800	7	8,224,966	313	4,415,071,528	1,422	7,093,784,238
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	21	2,497,843,646	0	0	0	0	21	2,497,843,646
30401	ALAT PENGOLAHAN	0	0	0	0	0	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	334	2,939,343,682	0	0	30	928,714,400	304	2,010,629,282
30502	ALAT RUMAH TANGGA	1,072	2,131,082,878	7	8,224,966	222	1,717,608,578	857	421,699,266
30601	ALAT STUDIO	11	12,957,650	0	0	2	2,000,000	9	10,957,650
30602	ALAT KOMUNIKASI	22	36,818,510	0	0	0	0	22	36,818,510
30603	PERALATAN PEMANCAR	0	0	0	0	0	0	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	2	162,000	0	0	0	0	2	162,000
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	1	104,263,500	0	0	1	104,263,500	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	172	2,495,178,824	0	0	57	1,394,360,050	115	1,100,818,774
31002	PERALATAN KOMPUTER	20	278,628,882	0	0	1	268,125,000	19	10,503,882
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	1	18,635,000	0	0	0	0	1	18,635,000
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	2	531,865,216	0	0	0	0	2	531,865,216
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	0	0	0	0	0	0	0	0
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	70	453,851,012	0	0	0	0	70	453,851,012
<b>TOTAL</b>			1,299,056,439,184		147,709,719,807		19,528,640,807		1,427,237,518,184

LAPORAN BARANG PEMBANTU PENGGUNA ESELON I  
 ASET TAK BERWUJUD  
 RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
 UAPPB-E1 : 12 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Tanggal : 03/03/21 12:57 PM  
 Halaman : 1  
 Kode Lap : lap\_atb\_es1

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2020		MUTASI				SALDO S.D 31 DESEMBER 2020	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162151	Software	72	780,983,190	13	1,054,319,800	0	0	85	1,835,302,990
80101	ASET TAK BERWUJUD	72	780,983,190	13	1,054,319,800	0	0	85	1,835,302,990
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	1	50,593,500	0	0	1	50,593,500	0	0
80101	ASET TAK BERWUJUD	1	50,593,500	0	0	1	50,593,500	0	0
<b>TOTAL</b>			831,576,690		1,054,319,800		50,593,500		1,835,302,990

**LAPORAN AMORTISASI BARANG PEMBANTU PENGGUNA ESELON I  
ASET TAK BERWUJUD  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
TAHUN ANGGARAN 2020**

UAPB : 013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

Tanggal : 03/03/21 12:57 PM

UAPPB-E1 : 12

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Halaman : 1

Kode Lap : lap\_bmn\_amor\_es1

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2020						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI AMORTISASI	BEBAN AMORTISASI	AKUMULASI AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=5-9
162151	Software		85	1,835,302,990	706,576,940	166,497,038	50,593,500	923,667,478	911,635,512
80101	ASET TAK BERWUJUD		85	1,835,302,990	706,576,940	166,497,038	50,593,500	923,667,478	911,635,512
<b>JUMLAH</b>			85	1,835,302,990	706,576,940	166,497,038	50,593,500	923,667,478	911,635,512